

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok 2019



BALAIKOTA DEPOK

**Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok**

Dengan



**Lembaga
Demografi**

**Lembaga Demografi
FEB Universitas Indonesia**

Tahun 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019

Ukuran Buku / *Book Size* : 28 Cm x 21,5 Cm

Jumlah Halaman / *Total Size* : 90 Halaman / *Page*

Naskah / *Manuscript*:

Lembaga Demografi FEB UI

Gambar Kulit dan Setting / *Cover Design and Setting*:

Lembaga Demografi FEB UI

Diterbitkan Oleh / *Published By*:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 dapat diterbitkan. Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, mengingat bahwa Kota Depok memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus tersendiri. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,**

Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19670124 198602 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 dapat diterbitkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 diukur dengan memperhatikan indikator Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro pembangunan sumber daya manusia kecamatan di Kota Depok.

Kami sadari publikasi ini masih belum sempurna, kekurangan dan kesalahan mungkin saja terjadi. Untuk perbaikan yang akan datang kritik dan saran sangat kami nantikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian, evaluasi dan perencanaan di wilayah Kota Depok.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2019

Kepala Lembaga Demografi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia



Hurno S. W.
Hurno Selrits Wongkaren, Ph.D

NUP: 061703001

DAFAT ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFAT ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Sumber Data	8
BAB II PEMBANGUNAN MANUSIA, KONSEP, DAN METODOLOGI	9
2.1. Teori Pembangunan Manusia	9
2.2. Indikator Pembangunan Manusia	11
2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia.....	14
2.4. Manfaat Pengukuran Pembangunan Manusia	19
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI	20
3.1. Gambaran Umum Wilayah.....	20
3.2. Kependudukan	22
3.3. Ketenagakerjaan	30
3.4. Pendidikan	34
3.5. Kesehatan	41
3.5. Ekonomi	49
3.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	49
3.5.2. Pola Konsumsi.....	66
BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK	68
4.1. Umum	68
4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok	68
4.3. Umur Harapan Hidup	70
4.4. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	72
4.5. Pengeluaran Perkapita	74
4.6. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok.....	76
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019.....	21
Tabel 3.2	Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019	22
Tabel 3.3	Jumlah dan Persentase Pertumbuhan Penduduk di Kota Depok Tahun 2006 – 2019.....	23
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018	25
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Kota Depok Tahun 2019	25
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Depok Tahun 2019.....	26
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016 - 2019 (Jiwa).....	28
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018	28
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019	29
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018	30
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019	30
Tabel 3.12	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok, Tahun 2019	31
Tabel 3.13	TPAK, TPT, dan TTK Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok, Tahun 2019.....	31
Tabel 3.14	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Depok, Tahun 2019.....	32
Tabel 3.15	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Depok, Tahun 2019	32
Tabel 3.16	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Depok Tahun 2019	33
Tabel 3.17	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Depok Tahun 2019.....	34
Tabel 3.18	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018 ...	35
Tabel 3.19	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Masih Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kota Depok Tahun 2019	35
Tabel 3.20	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Masih Sekolah Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kota Depok Tahun 2018	36

Tabel 3.21	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Depok Tahun 2019	36
Tabel 3.22	Persentase Pendududuk Berusia 10 Tahun Keatas yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kecamatan, Ijazah yang Dimiliki di Kota Depok Tahun 2019.....	37
Tabel 3.23	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019	37
Tabel 3.24	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Dapat Membaca dan Menulis Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019.....	38
Tabel 3.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018.....	38
Tabel 3.26	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018.....	38
Tabel 3.27	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018.....	39
Tabel 3.28	Jumlah Institusi Pendidikan Menurut Jenjang Pedidikan dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019 (dalam Unit).....	40
Tabel 3.29	Jumlah Program Jurusan yang Tersedia pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Depok Tahun 2019	41
Tabel 3.30	Angka/Umur Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2010 – 2019	42
Tabel 3.31	Angka Kesakitan/ Morbiditas Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019.....	43
Tabel 3.32	Angka Kesakitan/ Morbiditas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019	43
Tabel 3.33	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018.....	44
Tabel 3.34	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Kecamatan dan Tempat/Cara Berobat di Kota Depok Tahun 2019.....	45
Tabel 3.35	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018....	46
Tabel 3.36	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Kecamatan dan Tempat Rawat Inap di Kota Depok Tahun 2018.....	46
Tabel 3.37	Persentase Balita Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Kota Depok Tahun 2018	47
Tabel 3.38	Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Menyusui di Kota Depok Tahun 2018	48
Tabel 3.39	Persentase Balita Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Pernah Tidaknya Diimunisasi di Kota Depok Tahun 2018.....	49
Tabel 3.40	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Rp Miliar).....	50
Tabel 3.41	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Persen)	50

Tabel 3.42	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Persen).....	51
Tabel 3.43	Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp).....	57
Tabel 3.44	Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp).....	60
Tabel 3.45	Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Persen).....	63
Tabel 3.46	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kota Depok Tahun 2019.....	67
Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2016 – 2019*	69
Tabel 4.2	Umur Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun).....	71
Tabel 4.3	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun).....	72
Tabel 4.4	Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun).....	74
Tabel 4.5	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Rp. Ribu).....	75
Tabel 4.6	Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019*.....	76
Tabel 4.7	Selisih Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019*.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pembagian Administrasi Kota Depok Sejak Tahun 2008	21
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk di Kota Depok Tahun 2006-2019 (Jiwa)	24
Gambar 3.3	Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2018.....	26
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2019.....	27
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019	29
Gambar 3.6	Angka/Umur Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2010-2019	42
Gambar 4.1	Umur Harapan Hidup Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)	71
Gambar 4.2	Rata-rata Lama Sekolah Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)	73
Gambar 4.3	Harapan Lama Sekolah Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)	74
Gambar 4.4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Rp Ribu).....	75
Gambar 4.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016- 2019*.....	76
Gambar 4.6	Selisih IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2019* ...	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian system sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Program Pembangunan Nasional salah satu diantaranya adalah mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan penyediaan perumahan rakyat yang memadai, penyediaan lapangan pekerjaan, guna tercapainya taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang optimal. Di mana hal ini dibarengi dengan upaya memperkuat landasan yang kuat untuk keberlanjutan program yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Pada saat ini, titik berat pembangunan lebih pada orientasi pembangunan bidang sumber daya manusia. Hal ini merupakan dampak dari hasil pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ternyata menghasilkan kesenjangan yang sangat besar baik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, adanya kualitas hidup yang rendah, tingkat pendidikan yang tidak merata, daya beli masyarakat yang menurun drastis dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan manusia mempunyai multiplier effects ke berbagai bidang. Multiplier effects yang dimaksud adalah efek penyebaran (*spread effects*) yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang berdampak pada kegiatan lain karena kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan atau saling tergantung satu sama lain, misalnya dengan semakin membaiknya pendidikan dan kesehatan manusia maka dengan sendirinya memperbaiki tingkat pendapatannya, dan seterusnya akan menciptakan pula kegiatan lain yang sifatnya forward linkage seperti peningkatan pelayanan.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih

optimal. Untuk itu diperlukan indikator-indikator keberhasilan pembangunan yang selengkap mungkin sehingga perencanaan pembangunan ke depan dapat berhasil dengan optimal. Dengan pemanfaatan data pembangunan, diharapkan program pembangunan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah penduduk, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan ketenagakerjaan. Indikator-indikator untuk melihat tingkat pembangunan antara lain indeks pembangunan manusia, indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli untuk masing-masing kecamatan di Kota Depok.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, daerah yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa daerah berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikator pendapatan, kesehatan dan pendidikan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator Pendidikan mempengaruhi Indikator Kesehatan, begitu juga sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), karenanya dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu: (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan

bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu daerah dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran

tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung

terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin.

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Mengingat banyak manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia, namun dengan perkembangan masyarakat dipandang perlu mengubah metodologi penghitungannya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antara daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Karena mobilitas penduduk antar wilayah sangat tinggi sehingga PDB tidak dapat mencerminkan pendapatan suatu wilayah.

Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Artinya bila salah satu indeks bernilai tinggi, akan mendongkrak nilai IPM walaupun nilai indeks yang lain kecil. Hal ini tidak mencerminkan nilai masing-masing indeks. Tidak akan terlihat indeks mana yang kecil dan perlu penanganan lebih serius.

Seperti diungkapkan di atas, angka melek huruf sudah tidak mencerminkan indikator indeks pendidikan, sebagai gantinya digunakan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah akan terkait dengan fasilitas pendidikan di suatu daerah, infrastruktur

yang menunjang penduduk untuk mengakses fasilitas pendidikan, budaya rajin belajar, dan berbagai masalahnya.

Setelah dilihat perhitungan IPM metode lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan penduduk suatu wilayah maka dipakailah penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Metode ini diantaranya mempunyai keunggulan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Adapun PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

IPM selama ini dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat mencerminkan kualitas fisik penduduk di suatu daerah sekaligus dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk memantau perkembangan pembangunan manusia. Hal-hal berikut termasuk bagian dari permasalahan yang perlu terus dipantau:

1. Sudah pada tahap mana pemerintah Kota Depok mampu meningkatkan kualitas fisik penduduknya?
2. Faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas fisik penduduk di Kota Depok tersebut?

1.3. Tujuan

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 bertujuan untuk memaparkan sejauhmana perkembangan pembangunan manusia di kecamatan Kota Depok dan memberi gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat sejauhmana dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas penduduk.

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 adalah tersedianya indikator pembangunan kecamatan di Kota Depok yang meliputi:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok tahun 2019 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- b) Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok yang dirinci berdasarkan Kecamatan tahun 2019 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun).
- c) Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Depok berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun).
- d) Angka Harapan Lama Sekolah Kota Depok menurut Kecamatan Tahun 2019 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun).
- e) Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok menurut Kecamatan Tahun 2019 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (000 Rp.)

1.4. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam analisis Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2019 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 dua semester dengan sampel tambahan agar bisa mewakili angka Kecamatan. Sebagai data penunjang digunakan data proyeksi penduduk, dan beberapa sumber lain untuk menggambarkan geografis, luas wilayah dan sebagainya.

BAB II

PEMBANGUNAN MANUSIA, KONSEP, DAN METODOLOGI

2.1. Teori Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut

pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.2. Indikator Pembangunan Manusia

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b) Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

Lembaga UNDP telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Index* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106).

- *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir *atau life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk *atau infant mortality rate*.
- *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Pembangunan manusia Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses atau kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari segi aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Perencanaan pembangunan tanpa didukung oleh data yang baik dan benar, mustahil akan berjalan dengan baik dan mencapai sarannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei, baik yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraannya maupun masalah ekonomi. Cukup banyak kegiatan pengumpulan data (sensus/survei) yang berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraannya, diantaranya: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Frekuensi pengumpulan data kegiatan sensus/survei tersebut berbeda-beda. Sensus Penduduk dan

SUPAS dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, Susenas Modul dilaksanakan 3 tahun sekali dan Susenas Kor serta Sakernas dilaksanakan setiap tahun

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ini di Kota Depok dilaksanakan kegiatan Survei IPM, dari hasil ini dapat diturunkan berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dapat berguna untuk melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Hasil survei IPM ini perlu dianalisis atau diinterpretasikan agar mudah digunakan oleh perencana atau pengambil keputusan.

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penghitungan IPM Metode Baru antara lain:

a. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir (*Life Expectancy – e0*)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan panjangnya waktu yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung umur harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH.. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling - MYS*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling - EYS*). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas

Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Paritas Daya Beli dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP, pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP dengan pertimbangan share 27 komoditas metode lama terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Dari 96 komoditas dalam penghitungan PPP terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel di bawah ini. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352,00 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436,00

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Dimana:

- $I_{kesehatan}$: Indeks Kesehatan
- $I_{perndidikan}$: Indeks Pendidikan
- $I_{pengeluaran}$: Indeks Pengeluaran

Tabel 2.1 Daftar Komoditi Terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

MAKANAN				NON MAKANAN	
No	Komoditi	No	Komoditi	No	Komoditi
1	Beras	34	Pepaya	1	Rumah sendiri/bebas sewa
2	Tepung terigu	35	Minyak kelapa	2	Rumah kontrak
3	Ketela pohon/singkong	36	Minyak goreng lainnya	3	Rumah sewa
4	Kentang	37	Kelapa	4	Rumah dinas
5	Tongkol/tuna/cakalang	38	Gula pasir	5	Listrik
6	Kembung	39	Teh	6	Air PAM
7	Bandeng	40	Kopi	7	LPG
8	Mujair	41	Garam	8	Minyak tanah
9	Mas	42	Kecap	9	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
10	Lele	43	Penyedap masakan/vetsin	10	Perlengkapan mandi
11	Ikansegar lainnya	44	Mie instan	11	Barang kecantikan
12	Daging sapi	45	Roti manis/roti lainnya	12	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
13	Dagingayam ras	46	Kue kering	13	Sabun cuci
14	Daging ayam kampung	47	Kue basah	14	Biaya RS Pemerintah
15	Telur ayam ras	48	Makanan gorengan	15	Biaya RS Swasta
16	Susu kental manis	49	Gado-gado/ketoprak	16	Puskesmas/pustu
17	Susu bubuk	50	Nasi campur/rames	17	Praktek dokter/poliklinik
18	Susu bubuk bayi	51	Nasi goreng	18	SPP
19	Bayam	52	Nasi putih	19	Bensin
20	Kangkung	53	Lontong/ketupat sayur	20	Transportasi/pengangkutan umum
21	Kacang panjang	54	Soto/gule/sop/rawon/cin cang	21	Pos dan Telekomunikasi
22	Bawang merah	55	Sate/tongseng	22	Pakaian jadi laki-laki dewasa
23	Bawang putih	56	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	23	Pakaian jadi perempuan dewasa
24	Cabe merah	57	Makanan ringan anak	24	Pakaian jadi anak-anak
25	Cabe rawit	58	Ikan (goreng/bakar dll)	25	Alas kaki
26	Tahu	59	Ayam/daging (goreng dll)	26	Minyak Pelumas
27	Tempe	60	Makanan jadi lainnya	27	Meubelair
28	Jeruk	61	Air kemasangalon	28	Peralatan Rumah Tangga
29	Mangga	62	Minuman jadi lainnya	29	Perlengkapan perabot rumah tangga
30	Salak	63	Es lainnya	30	Alat-alat Dapur/Makan
31	Pisang Ambon	64	Roko kretek filter		
32	Pisang raja	65	Rokok kretek tanpa filter		
33	Pisang lainnya	66	Rokok putih		

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

a) Dimensi Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Dimana:

- UHH : Umur Harapan Hidup
UHH_{min} : Umur Harapan Hidup Minimum
UHH_{maks} : Umur Harapan Hidup Maksimum
I_{Kesehatan} : Indeks Kesehatan

b) Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimana:

- HLS : Harapan Lama Sekolah
HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah Minimum
HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah Maksimum
I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah Minimum
RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah Maksimum
I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
I_{Pendidikan} : Indeks Pendidikan

c) Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Dimana:

- Pengeluaran_{min} : Pengeluaran Minimum
Pengeluaran_{maks} : Pengeluaran Maksimum
I_{pengeluaran} : Indeks Pengeluaran

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (RP)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (RP)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.4. Manfaat Pengukuran Pembangunan Manusia

Manfaat dari pengukuran pembangunan manusia antara lain:

- a) Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
- b) Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
- c) Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI

3.1. Gambaran Umum Wilayah

Kota Depok terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak pada koordinat:

006° 19' 00" – 006° 28' 00" Lintang Selatan

106° 43' 00" – 106° 55' 30" Bujur Timur

Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km².

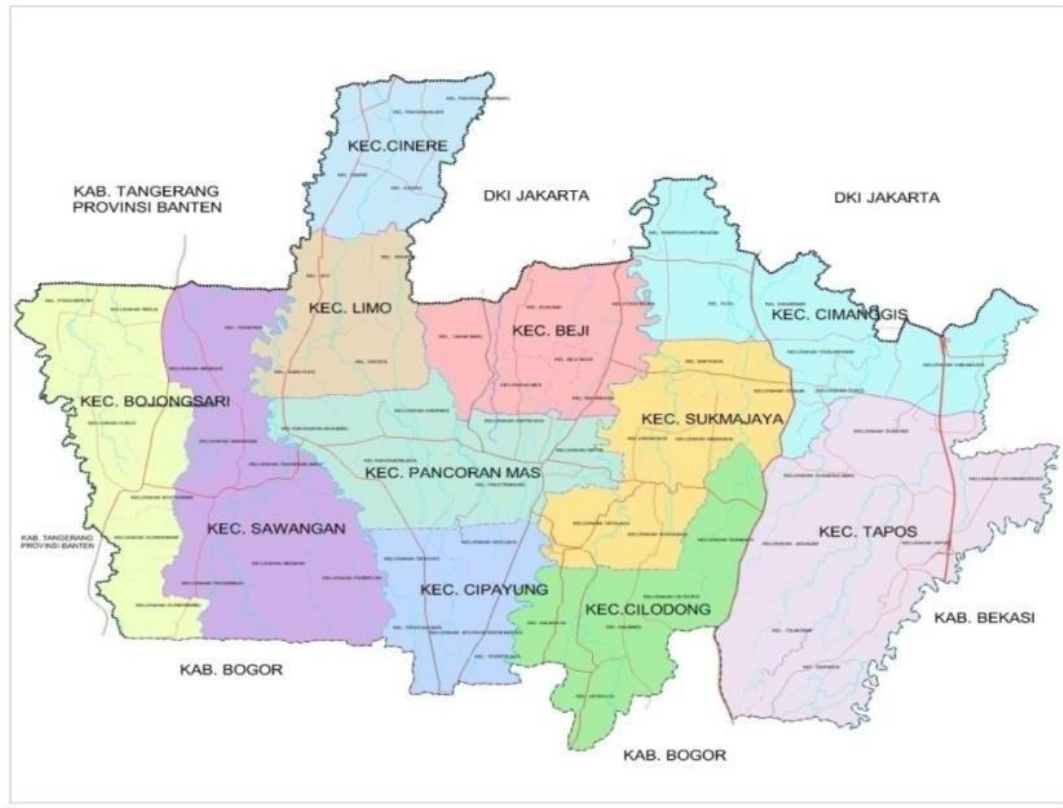
Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten dan duapropinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Ibukota Kota Depok sebagai pusat pemerintahan, berkedudukan di Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari 11 Kecamatan, 63 Kelurahan, 883 RW dan 4.990 RT. Dengan luas wilayah tercatat seluas 20.029 Ha atau setara dengan 200,29 Km² atau sekitar 0.58 persen dari luas Propinsi Jawa Barat.

Secara administrasi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok terbagi menjadi 11 Kecamatan masing-masing adalah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan

Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.



Gambar 3.1 Pembagian Administrasi Kota Depok Sejak Tahun 2008

**Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Depok
Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sawangan	26,19	13,08
2.	Bojongsari	19,30	9,64
3.	Pancoran Mas	18,03	9,00
4.	Cipayung	11,45	5,72
5.	Sukmajaya	17,35	8,66
6.	Cilodong	16,19	8,08
7.	Cimanggis	21,58	10,77
8.	Tapos	33,26	16,61
9.	Beji	14,56	7,27
10.	Limo	11,84	5,91
11.	Cinere	10,55	5,27
Kota Depok		200,29	100,00

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,26 km² atau 16,61 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,55 km² atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

Tabel 3.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Sawangan	7	83	415
2.	Bojongsari	7	87	371
3.	Pancoran Mas	6	107	639
4.	Cipayung	5	53	346
5.	Sukmajaya	6	125	904
6.	Cilodong	5	68	391
7.	Cimanggis	6	92	659
8.	Tapos	7	135	658
9.	Beji	6	75	398
10.	Limo	4	49	258
11.	Cinere	4	42	215
	Kota Depok	63	916	5.254

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Jumlah kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos dengan masing-masing berjumlah 7 kelurahan. Jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 135 RW. Adapun Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 904 RT.

3.2. Kependudukan

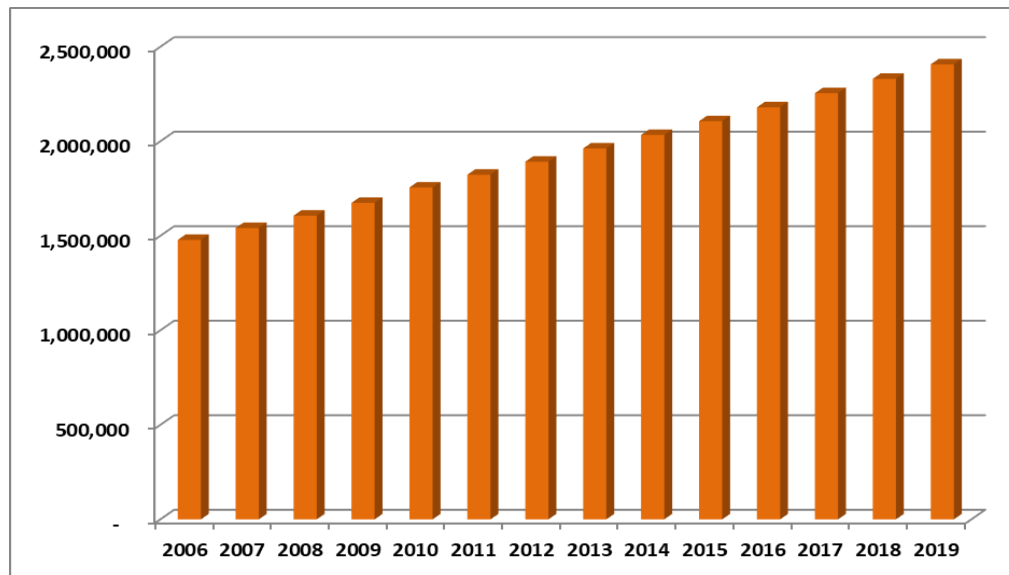
Informasi kependudukan meliputi jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Informasi ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan. Permasalahan kependudukan tidak selamanya mengenai masalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi namun sekaligus dapat menjadi beban bagi suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan tidak cukup hanya dengan mengendalikan jumlah penduduk, akan tetapi juga dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Pertumbuhan Penduduk
di Kota Depok Tahun 2006 – 2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Pertumbuhan Penduduk (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2006	1.478.265	-
2007	1.541.291	4,26
2008	1.606.632	4,24
2009	1.674.351	4,21
2010	1.755.612	4,85
2011	1.823.182	3,85
2012	1.891.981	3,77
2013	1.962.182	3,71
2014	2.033.508	3,64
2015	2.106.102	3,57
2016	2.179.813	3,50
2017	2.254.513	3,43
2018	2.330.333	3,36
2019	2.406.826	3,28

Sumber: Data Proyeksi Penduduk dan SP 2010

Jumlah penduduk Kota Depok secara absolut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2019 mencapai 2,41 juta jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 76,49 ribu jiwa. Persentase pertambahan penduduk pada tahun 2019 sebesar 3,28 persen. Persentase pertambahan penduduk dari tahun ke tahun fluktuasi dengan besaran 3,28 sampai dengan 4,85 persen per tahun selama tahun 2006-2019. Pertambahan penduduk di Kota Depok selain disebabkan kelahiran juga disebabkan imigrasi masuk dengan tujuan bersekolah maupun bekerja.



Sumber: Data Proyeksi Penduduk dan SP 2010

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk di Kota Depok Tahun 2006-2019 (Jiwa)

Piramida Penduduk Muda (*Ekspansif*), angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Piramida Penduduk Muda (*Ekspansif*) memiliki ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, serta pertumbuhan penduduk tinggi. Pada tahun 2018, berdasarkan kelompok umurnya terdapat 5 (lima) kelompok umur yang cukup dominan diantaranya; kelompok umur 30–34 tahun sebanyak 216.153 jiwa, kelompok umur 25–29 tahun sebanyak 211.457 jiwa, kelompok umur 20–24 tahun sebanyak 209.802 jiwa, kelompok umur 35–39 tahun sebanyak 207.479 jiwa, dan kelompok umur 40–44 tahun sebanyak 190.157 jiwa.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018

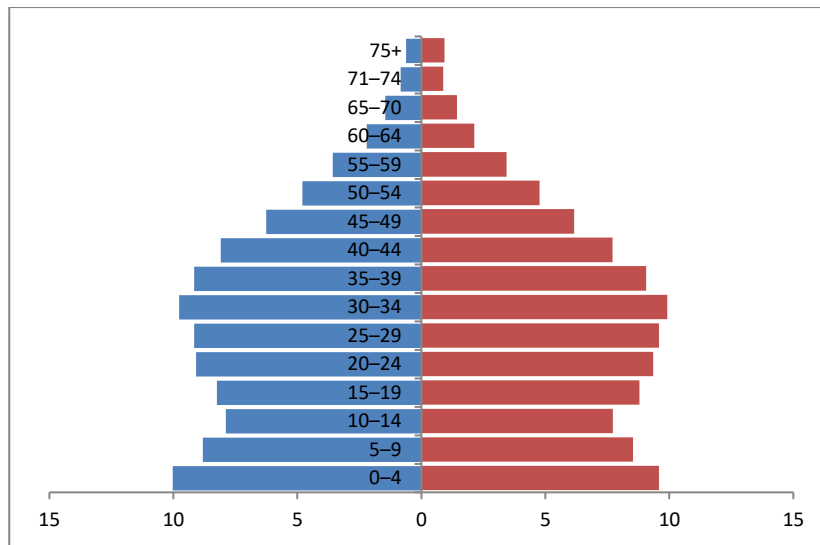
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	109.966	103.767	213.733
5-9	100.697	96.549	197.246
10-14	87.696	83.718	171.414
15-19	91.501	95.458	186.959
20-24	104.312	105.490	209.802
25-29	104.054	107.403	211.457
30-34	108.808	107.345	216.153
35-39	104.003	103.476	207.479
40-44	97.303	92.854	190.157
45-49	79.966	77.656	157.622
50-54	63.256	62.079	125.335
55-59	48.152	47.478	95.630
60-64	32.132	30.911	63.043
65-70	21.436	19.091	40.527
71-74	11.192	11.348	22.540
75+	8.628	12.608	21.236
Kota Depok	1.173.102	1.157.231	2.330.333

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Kota Depok Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	111,748	105,472	105.95
5 - 9	103,348	99,409	103.96
10 - 14	89,973	85,809	104.85
15 - 19	93,394	97,379	95.91
20 - 24	106,985	108,033	99.03
25 - 29	106,760	110,477	96.64
30 - 34	111,690	109,919	101.61
35 - 39	106,307	105,833	100.45
40 - 44	100,289	96,398	104.04
45 - 49	83,491	81,369	102.61
50 - 54	66,856	65,634	101.86
55 - 59	51,027	50,554	100.94
60 - 64	34,398	33,463	102.79
65 - 69	23,343	20,620	113.21
70 - 74	12,033	12,089	99.54
75 +	9,245	13,481	68.58
Jumlah	1,210,887	1,195,939	101.25

Sumber: Data Proyeksi Penduduk, 2019



Sumber: BPS Kota Depok, 2019

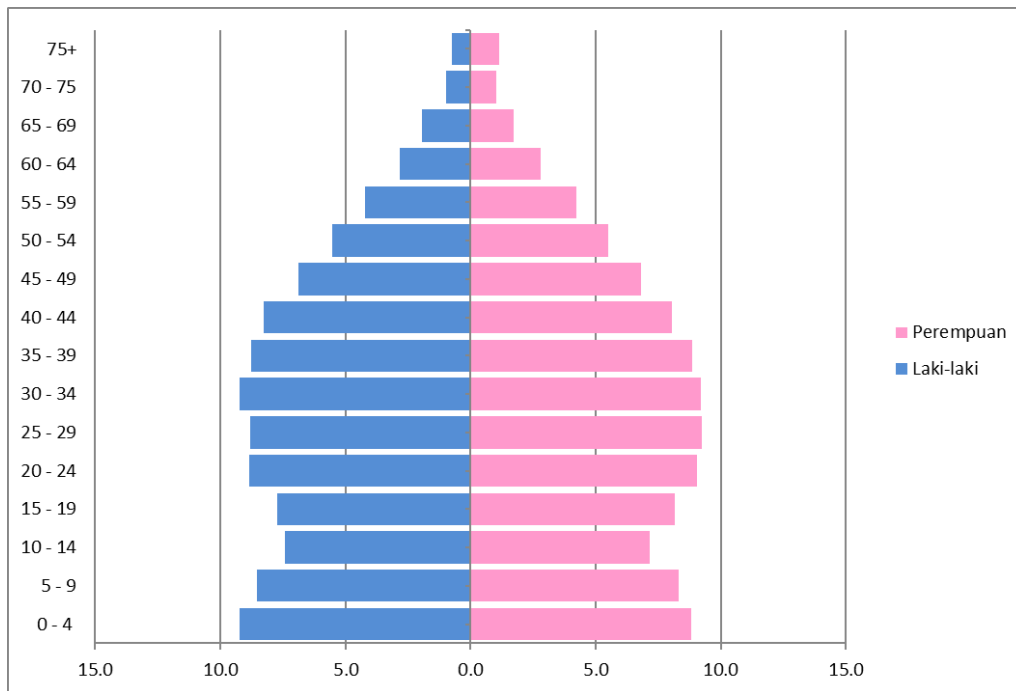
Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2018

Pada tahun 2019, jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok masih lebih tinggi dari pada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,25 persen. Hal ini dapat dilihat dari *sex ratio* total penduduk Kota Depok sebesar 101,25. Senada dengan total penduduk, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, *sex ratio* penduduk Kota Depok hampir sebagian besar masih di atas 100 persen. Akan tetapi masih terdapat *sex ratio* di bawah 100 persen. Namun demikian selisihnya tidak terpaut jauh, berkisar di bawah 5 persen. Kecuali pada kelompok umur 75 tahun keatas yang selisihnya mencapai 31,42 persen. Hal ini menunjukkan tingkat harapan hidup laki-laki jauh lebih rendah dari pada perempuan.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Depok Tahun 2019

0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)
595.759	1.720.256	90.811	39,91

Sumber: Data Proyeksi Penduduk



Sumber: Data Proyeksi Penduduk, 2019

Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2019

Jumlah Penduduk Kota Depok berdasarkan tahun 2018 sebanyak 2.330.333 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.173.102 jiwa dan perempuan 1.157.231 jiwa. Dibandingkan tahun 2017, penduduk Kota Depok Tahun 2018 bertambah sekitar 75.820 jiwa atau dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,36 persen. Jumlah Penduduk Perempuan terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 157.041 jiwa. Kemudian Penduduk Laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Cimanggis dengan jumlah 163.834 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk untuk tahun 2019, jumlah penduduk Kota Depok berjumlah 2.406.826 jiwa. Jika dilihat dari distribusi/ persebaran penduduk antar kecamatan, kecamatan Cimanggis masih menduduki peringkat pertama sebagai kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Depok, sebesar 334.989 jiwa atau 13,92 persen. Disusul oleh Kecamatan Sukmajaya sebesar 291.429 atau 13,36 persen. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Limo sebesar 121.760 jiwa atau 5,06 persen. Disusul Kecamatan Bojongsari sebesar 138.070 jiwa atau 5,74 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok
Tahun 2016 - 2019 (Jiwa)**

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1.	Sawangan	154,933	159,613	165,631	171,068
2.	Bojongsari	125,047	128,894	133,682	138,070
3.	Pancoran Mas	263,942	273,447	282,167	291,429
4.	Cipayung	160,382	165,361	171,457	177,085
5.	Sukmajaya	291,267	302,719	311,379	321,600
6.	Cilodong	156,742	161,866	167,565	173,066
7.	Cimanggis	303,392	313,987	324,343	334,989
8.	Tapos	271,090	280,121	289,809	299,322
9.	Beji	208,009	215,215	222,372	229,671
10.	Limo	110,275	113,684	117,890	121,760
11.	Cinere	134,734	139,606	144,038	148,766
	Kota Depok	2,179,813	2,254,513	2,330,333	2,406,826

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

**Tabel 3.8 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Sawangan	84.239	81.392	165.631	103,50
2.	Bojongsari	67.822	65.860	133.682	102,98
3.	Pancoran Mas	141.830	140.337	282.167	101,06
4.	Cipayung	87.037	84.420	171.457	103,10
5.	Sukmajaya	154.338	157.041	311.379	98,28
6.	Cilodong	84.562	83.003	167.565	101,88
7.	Cimanggis	163.834	160.509	324.343	102,07
8.	Tapos	145.498	144.311	289.809	100,82
9.	Beji	112.487	109.885	222.372	102,37
10.	Limo	59.616	58.274	117.890	102,30
11.	Cinere	71.839	72.199	144.038	99,50
	Kota Depok	1.173.102	1.157.231	2.330.333	101,37

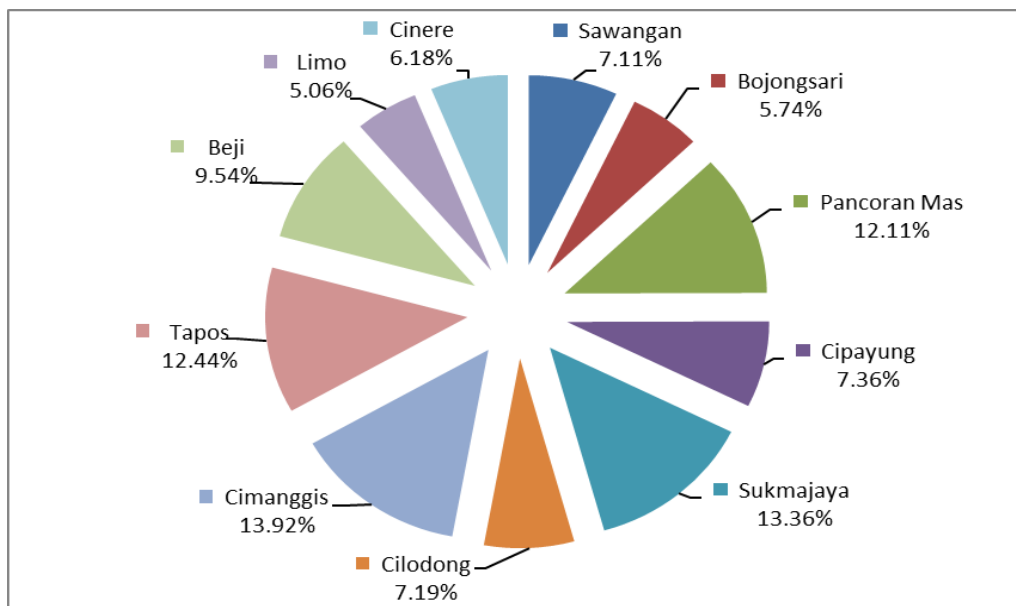
Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Meskipun Kecamatan Cimanggis berpenduduk paling besar, namun tidak menjadikannya sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat. Tiga kecamatan dengan penduduk terpadat secara berurutan yaitu Kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas dan Beji. Hal ini disebabkan karena luas wilayah tiga kecamatan tersebut lebih kecil dibanding dengan Kecamatan Cimanggis. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Tapos, disusul oleh Kecamatan Sawangan, Cimanggis dan Bojongsari. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Cinere, disusul oleh Kecamatan Cipayung, Limo, dan Beji.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Sawangan	86,952	84,116	171,068	103.37
2.	Bojongsari	70,007	68,064	138,070	102.85
3.	Pancoran Mas	146,398	145,031	291,429	100.94
4.	Cipayung	89,840	87,244	177,085	102.98
5.	Sukmajaya	159,309	162,291	321,600	98.16
6.	Cilodong	87,286	85,780	173,066	101.76
7.	Cimanggis	169,111	165,878	334,989	101.95
8.	Tapos	150,184	149,137	299,322	100.70
9.	Beji	116,110	113,561	229,671	102.24
10.	Limo	61,536	60,223	121,760	102.18
11.	Cinere	74,153	74,613	148,766	99.38
	Kota Depok	1,210,887	1,195,939	2,406,826	101.25

Sumber: BPS Kota Depok, 2019



Sumber: Data Proyeksi Penduduk, 2019

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sawangan	165.631	26,19	6.324
2.	Bojongsari	133.682	19,3	6.927
3.	Pancoran Mas	282.167	18,03	15.650
4.	Cipayung	171.457	11,45	14.974
5.	Sukmajaya	311.379	17,35	17.947
6.	Cilodong	167.565	16,19	10.350
7.	Cimanggis	324.343	21,58	15.030
8.	Tapos	289.809	33,26	8.713
9.	Beji	222.372	14,56	15.273
10.	Limo	117.890	11,84	9.957
11.	Cinere	144.038	10,55	13.653
	Kota Depok	2.330.333	200,29	11.635

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sawangan	171,068	26,19	6,532
2.	Bojongsari	138,070	19,3	7,154
3.	Pancoran Mas	291,429	18,03	16,164
4.	Cipayung	177,085	11,45	15,466
5.	Sukmajaya	321,600	17,35	18,536
6.	Cilodong	173,066	16,19	10,690
7.	Cimanggis	334,989	21,58	15,523
8.	Tapos	299,322	33,26	8,999
9.	Beji	229,671	14,56	15,774
10.	Limo	121,760	11,84	10,284
11.	Cinere	148,766	10,55	14,101
	Kota Depok	2,406,826	200,29	12,017

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

3.3. Ketenagakerjaan

Pola jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia kerja tahun 2019 (1,82 juta orang) meningkat sebesar 3,5 persen dibandingkan tahun 2018 (1,76 juta orang). Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Depok mencapai 1.821.618, terdiri atas 911.112 penduduk laki-laki (50,02 %) dan 910.506 penduduk perempuan (49,98 %).

Tabel 3.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok, Tahun 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	745,515	81.82	439,168	48.23	1,184,683	65.03
a. Bekerja	701,894	94.15	410,464	93.46	1,112,358	93.89
b. Pengangguran	43,621	5.85	28,704	6.54	72,325	6.11
2. Bukan Angkatan kerja	165,597	18.18	471,338	51.77	636,935	34.97
a. Sekolah	86,101	51.99	92,942	19.72	179,043	28.11
b. Mengurus Rumah Tangga	36,172	21.84	360,368	76.46	396,540	62.26
c. Lainnya	43,324	26.16	18,028	3.82	61,352	9.63
Jumlah	911,112	100.00	910,506	100.00	1,821,618	100.00

Sumber: Data Sakernas, 2019

Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPAK Kota Depok tahun 2019 sebesar 65,41%, naik dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 62,64%. Setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 65 orang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tahun 2019 sebesar 6,11%, turun dari 6,64% pada tahun 2018. Dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat 6 orang diantaranya yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Depok tahun 2019 sebesar 93,89%, artinya 9389% penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja.

Tabel 3.13 TPAK, TPT, dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok, Tahun 2019

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82.30	48.51	65.41
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.85	6.54	6.11
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94.15	93.46	93.89

Sumber: Data Sakernas, 2019

Dilihat menurut jenis kelamin jumlah penduduk perempuan yang bekerja lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki yang bekerja. Jumlah penduduk laki-laki yang bekerja hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan yang bekerja. Hampir separuh penduduk usia 15 tahun yang bekerja berpendidikan tamat SMA Umum/SMA Kejuruan (44,58%), kemudian berpendidikan Diploma/universitas (26,85%) dan tamat SLTP sebanyak 14,76%. Adapun penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan pendidikan maksimum tamat SD sebesar 13,80%.

Berdasarkan Lapangan Usaha Utama, penyerapan tenaga kerja banyak terdapat di sektor jasa, yakni sebesar 79,95%. Kemudian disusul oleh manufaktur sebesar 19,68%. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian hanya sebesar 0,37% pada tahun 2019.

Tabel 3.14 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Depok, Tahun 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/blm pernah sekolah/ Tdk/blm tamat SD/ Tamat SD	89,324	12.73	64,168	15.63	153,492	13.80
SMP	94,719	13.49	69,514	16.94	164,233	14.76
SMA Umum	150,757	21.48	53,466	13.03	204,223	18.36
SMA Kejuruan	196,251	27.96	95,455	23.26	291,706	26.22
Diploma I/II/III	38,529	5.49	36,369	8.86	74,898	6.73
Universitas	132,314	18.85	91,492	22.29	223,806	20.12
Jumlah	701,894	100.00	410,464	100.00	1,112,358	100.00

Sumber: Data Sakernas, 2019

Tabel 3.15 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Depok, Tahun 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	4,090	0.58	-	0.00	4,090	0.37
2. Manufaktur	158,112	22.53	60,853	14.83	218,965	19.68
3. Jasa	539,692	76.89	349,611	85.17	889,303	79.95
Jumlah	701,894	100.00	410,464	100.00	1,112,358	100.00

Sumber: Data Sakernas, 2019

Berdasarkan hasil Sakernas 2019, jumlah pengangguran terbuka di Kota Depok menunjukkan angka yang naik turun. Pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 72.521 jiwa, meningkat drastis selama 2 tahun yakni sebanyak 76.025 jiwa. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pengangguran terbuka di Kota Depok mencapai 73.080 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran di Kota Depok mencapai 72.325 jiwa. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan maka jumlah pengangguran terbuka terjadi pada penduduk yang menamatkan SMA Umum/SMA Kejuruan sebesar 56,30%. Dengan kata lain bahwa pengangguran terbuka sebagian besar didominasi oleh pengangguran yang memiliki latar belakang dengan tamatan tertinggi SMA Umum/SMA Kejuruan. Kemudian jumlah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan Diploma/Universitas sebanyak 9.824 jiwa atau sebesar 13,58%.

Tabel 3.16 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Depok Tahun 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/blm pernah sekolah/ Tdk/blm tamat SD/ Tamat SD	8,986	20.60	-	0.00	8,986	12.42
SMP	8,275	18.97	4,521	15.75	12,796	17.69
SMA Umum	7,059	16.18	6,576	22.91	13,635	18.85
SMA Kejuruan	14,826	33.99	12,258	42.70	27,084	37.45
Diploma I/II/III	2,598	5.96	479	1.67	3,077	4.25
Universitas	1,877	4.30	4,870	16.97	6,747	9.33
Jumlah	43,621	100.00	28,704	100.00	72,325	100.00

Sumber: Data Susenas, 2019

3.4. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 3.17 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Depok Tahun 2019

Partisipsi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tidak / Belum pernah sekolah	0.78	1.06	0.92
Masih bersekolah	20.13	19.34	19.73
Tidak bersekolah lagi	79.09	79.60	79.35

Sumber: Data Susenas 2019

Pada tahun 2019 penduduk Kota Depok usia 10 tahun keatas yang masih bersekolah sebesar 19,73 persen, bila dilihat menurut jenis kelamin 20,13 persen laki- laki dan 19,34 persen perempuan. Untuk yang tidak atau belum bersekolah sebesar 0,92 persen. Penduduk pada kategori ini kemungkinan diisi oleh penduduk lansia yang sudah tidak produktif. Sedangkan kelompok terbesar adalah penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 79,35 persen. Pola pada tiap-tiap kecamatan juga hampir serupa.

Tabel 3.18 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak / belum Pernah Bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sawangan	1.17	22.25	76.58	1.17
Bojongsari	1.16	20.21	78.63	1.16
Pancoran Mas	0.38	19.71	79.91	0.38
Cipayung	0.44	19.53	80.03	0.44
Sukmajaya	1.04	18.11	80.85	1.04
Cilodong	1.27	20.03	78.70	1.27
Cimanggis	0.60	18.54	80.86	0.60
Tapos	1.62	19.86	78.52	1.62
Beji	0.62	21.54	77.84	0.62
Limo	1.03	20.58	78.39	1.03
Cinere	1.03	18.98	79.99	1.03
Kota Depok	0,92	19,73	79,35	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Tabel 3.19 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Masih Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kota Depok Tahun 2019

Jenjang Pendidikan yang sedang diduduki	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD / Sederajat	21.41	23.49	22.43
SMP / Sederajat	25.14	26.68	25.89
SMA / Sederajat	27.65	25.46	26.57
D1/ D2	0.69	0.31	0.51
D3 / Sarjana Muda	2.72	2.92	2.82
D4 / S1	21.26	19.87	20.58
S2 /S3	1.13	1.27	1.20

Sumber: Data Susenas 2019

Dari 19,73 persen penduduk Depok usia 10 tahun keatas yang masih bersekolah, menyebar hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah. Tertinggi 26,57 persen bersekolah pada SMA/ sederajat, 25,89 persen SMP/ sederajat, dan 22,43 persen pada SMA/ sederajat. Sedangkan tingkat perguruan tinggi yang paling banyak adalah penduduk Depok usia 10 tahun keatas yaitu D4/S1 sebesar 20,58 persen. Persebaran pada tiap-tiap kecamatan mempunyai pola yang hampir serupa dengan Kota Depok.

Tabel 3.20 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Masih Sekolah Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki								Jumlah
	SD / sederajat	SMP / sederajat	SMA/ sederajat	SMK	D1/ D2	D3/ Sarjana Muda	D4/S1	S2/ S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sawangan	24.80	27.89	18.96	0.00	1.42	21.66	5.27	24.80	100,00
Bojongsari	19.63	27.59	28.83	0.88	1.22	21.85	0	19.63	100,00
Pancoran Mas	22.16	28.10	26.12	0.00	1.52	20.99	1.11	22.16	100,00
Cipayung	27.44	28.61	29.24	2.11	2.81	9.79	0	27.44	100,00
Sukmajaya	20.44	23.78	25.63	1.36	5.20	22.97	0.62	20.44	100,00
Cilodong	22.31	23.72	23.61	0.00	3.56	25.40	1.40	22.31	100,00
Cimanggis	24.43	22.93	30.88	0.00	3.89	17.35	0.52	24.43	100,00
Tapos	22.58	31.38	24.76	0	1.53	19.75	0	22.58	100,00
Beji	18.01	20.42	29.12	0	5.37	25.43	1.65	18.01	100,00
Limo	24.2	29.98	31.37	0	0	11.42	3.03	24.2	100,00
Cinere	22.32	22.26	23.43	2.23	1.23	27.37	1.16	22.32	100,00
Kota Depok	22.43	25.89	26.57	0.51	2.82	20.58	1.2	22.43	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Dari 79,35 persen penduduk kota Depok usia 10 tahun keatas yang tidak bersekolah lagi, sebagian besar mempunyai ijazah SMA/ sederajat (31,64 persen). Yang berijazah D4/S1 (16,27 persen). Urutan selanjutnya berijazah SMK sebesar 13,97 persen. Selanjutnya berijazah SMP / Sederajat (13,52 persen). Jika dilihat dari persebaran kecamatannya, sebagian besar mempunyai pola yang hampir sama, pendidikan SMA/ sederajat dan D4/S1 menjadi ijazah terbanyak yang dimiliki oleh penduduk usia 10 tahun keatas.

Tabel 3.21 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Depok Tahun 2019

Ijazah yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	3.29	4.94	4.12
SD / Sederajat	8.91	13.02	10.97
SMP / Sederajat	12.57	14.46	13.52
SMA / Sederajat	34.14	29.17	31.64
SMK	14.40	13.54	13.97
D1/ D2	0.55	0.79	0.67
D3 / Sarjana Muda	6.03	8.07	7.05
D4 / S1	17.60	14.94	16.27
S2 /S3	2.51	1.07	1.79
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas 2019

Tabel 3.22 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kecamatan, Ijazah yang Dimiliki di Kota Depok Tahun 2019

Kecamatan	Ijazah yang Dimiliki								
	Tidak Punya Ijazah SD	SD / sederajat	SMP / sederajat	SMA/ sederajat	SMK	D1/ D2	D3/ Sarjana Muda	D4/ S1	S2/ S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sawangan	5.34	10.04	11.26	31.30	14.98	1.08	4.91	18.67	2.42
Bojongsari	2.27	14.62	13.25	34.87	11.88	0.49	5.68	15.99	0.95
Pancoran Mas	5.25	8.96	11.02	36.24	13.66	0.38	7.37	15.68	1.44
Cipayung	9.78	10.59	18.77	30.46	14.33	1.40	3.02	11.08	0.57
Sukmajaya	4.03	8.79	11.86	30.93	11.36	0.85	9.09	21.51	1.58
Cilodong	3.39	7.59	13.64	29.47	18.10	0.86	9.01	16.49	1.45
Cimanggis	1.56	14.58	15.14	39.22	9.42	0.30	5.09	13.44	1.25
Tapos	2.40	12.65	14.20	30.65	17.92	-	6.42	14.81	0.95
Beji	4.64	8.96	10.70	25.89	16.52	0.78	9.58	19.65	3.28
Limo	6.98	12.68	20.17	24.10	19.90	0.51	5.90	9.10	0.66
Cinere	2.85	11.89	12.45	25.04	10.21	1.64	10.61	19.12	6.19
Kota Depok	4.12	10.97	13.52	31.64	13.97	0.67	7.05	16.27	1.79

Sumber: Data Susenas 2019

Kemampuan membaca dan menulis penduduk Depok usia 10 tahun keatas pada tahun 2019 sebesar 99,06 persen, untuk laki-laki sebesar 99,15 persen dan perempuan sebesar 98,97 persen. Kecamatan dengan persentase tertinggi yaitu Pancoran Mas sebesar 100,00 persen dan terendah Sawangan sebesar 97,71 persen.

Tabel 3.23 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019

Kemampuan Membaca/Menulis	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dapat	0.85	1.03	0.94
Tidak Dapat	99.15	98.97	99.06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas 2019

Tabel 3.24 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Dapat Membaca dan Menulis Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019

Kecamatan	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sawangan	96.95	98.49	97.71
Bojongsari	99.14	98.76	98.95
Pancoran Mas	100.00	100.00	100.00
Cipayung	99.67	98.77	99.23
Sukmajaya	98.91	98.22	98.56
Cilodong	99.72	97.91	98.82
Cimanggis	99.44	99.79	99.62
Tapos	99.06	98.78	98.92
Beji	99.42	99.77	99.60
Limo	97.94	98.45	98.19
Cinere	99.24	98.42	98.83
Kota Depok	99,15	98,97	99,06

Sumber: Data Susenas 2019

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018

APK	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APK SD	103,94	110,58	107,33
APK SMP	98,97	88,96	93,93
APK SMA	84,97	87,91	86,32

Sumber: Data Susenas 2018

Tabel 3.26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018

APS	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS (7-12)	98,45	100,00	99,19
APS (13-15)	98,92	92,14	95,31
APS (16-18)	80,34	80,17	80,26

Sumber: Data Susenas 2018

**Tabel 3.27 Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018**

APM	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
APM SD	94,08	93,02	93,58
APM SMP	89,97	80,68	85,03
APM SMA	68,28	66,70	67,54

Sumber: Data Susenas 2018

Tabel-tabel di atas masing-masing menunjukkan APK, APS, dan APM di Kota Depok pada tahun 2018 (berdasarkan ketersediaan data terakhir). Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang menduduki pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK SD Kota Depok tahun 2018 sebesar 107,33. Nilai ini menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dimana APK SMP sebesar 93,93 dan APK SMA sebesar 86,32. Nilai APK SD dan APK SMA perempuan lebih unggul dibanding laki-laki, namun berbalik pada APK SMP dimana nilai untuk laki-laki lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS ini bertujuan Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Nilai APS 7-12 Kota Depok tahun 2018 sebesar 99,19. Nilai ini menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dimana APS 13-15 sebesar 95,31 dan APS 16-18 sebesar 80,26.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila

APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Nilai APM SD Kota Depok tahun 2018 sebesar 93,58. Nilai ini menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dimana APM SMP sebesar 85,03 dan APM SMA sebesar 67,54. Nilai APM SD, APM SMP, APM SMA laki-laki lebih unggul dibanding perempuan.

Ketersediaan dan kemudahan akses sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Jumlah sarana institusi pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sebanyak 875 unit institusi pendidikan. Dimana sebanyak 436 unit SD, sebanyak 229 unit SMP, sebanyak 66 unit SMA, sebanyak 131 unit SMK, dan sebanyak 13 unit SLB.

Dalam hal penyediaan tenaga kerja di Kota Depok sangat tergantung dengan faktor input pembangunan manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan. Penyediaan tenaga kerja terampil di Kota Depok banyak disediakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain jenis pendidikan yang lebih tinggi, seperti jenjang pendidikan Diploma – sarjana. Jumlah SMK di Kota Depok mencapai 131 unit SMK jauh lebih banyak dengan SMA yang hanya 66 unit SMA.

Tabel 3.28 Jumlah Institusi Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019 (dalam Unit)

No.	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1.	Kec. Pancoran Mas	60	39	17	26	3	145
2.	Kec. Sukmajaya	65	22	7	15	1	110
3.	Kec. Cimanggis	56	26	8	10	1	101
4.	Kec. Tapos	48	24	4	12	1	89
5.	Kec. Sawangan	40	24	5	18	0	87
6.	Kec. Beji	35	16	6	11	3	71
7.	Kec. Cilodong	32	18	5	9	1	65
8.	Kec. Bojongsari	32	16	4	10	1	63
9.	Kec. Cipayung	28	18	3	6	1	56
10.	Kec. Limo	24	15	3	7	0	49
11.	Kec. Cinere	16	11	4	7	1	39
	Total	436	229	66	131	13	875

Sumber: Data Sekolah Kota Depok – Dapodikdasmen, 2019

Tabel 3.29 Jumlah Program Jurusan yang Tersedia pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Depok Tahun 2019

No.	Program Jurusan	Jumlah
1.	Akuntansi dan Keuangan	31
2.	Akuntansi Lembaga Keuangan	20
3.	Bisnis Konstruksi dan Properti	1
4.	Farmasi	12
5.	Keperawatan	11
6.	Multimedia	38
7.	Pariwisata dan Perhotelan	14
8.	Perbankan Syariah	1
9.	Seni Rupa	1
10.	Tata Boga dan Kuliner	11
11.	Tata Busana dan Kecantikan	3
12.	Teknik Elektronika	9
13.	Teknik Elektronika Pesawat Udara	1
14.	Teknik Ketenagalistrikan	2
15.	Teknik Komputer dan Informatika	54
16.	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	1
17.	Teknik Pesawat Udara	1
18.	Manajemen Administrasi Perkantoran	78
19.	Analisis Kesehatan dan Laboratorium	5
20.	Bisnis Manajemen Pemasaran dan Tata Niaga	43
21.	Teknik Mesin dan Otomotif	29
	Jumlah	366

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen, 2019

3.5. Kesehatan

Kualitas kesehatan menjadi aspek penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Indikator penting yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan antara lain angka harapan hidup. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

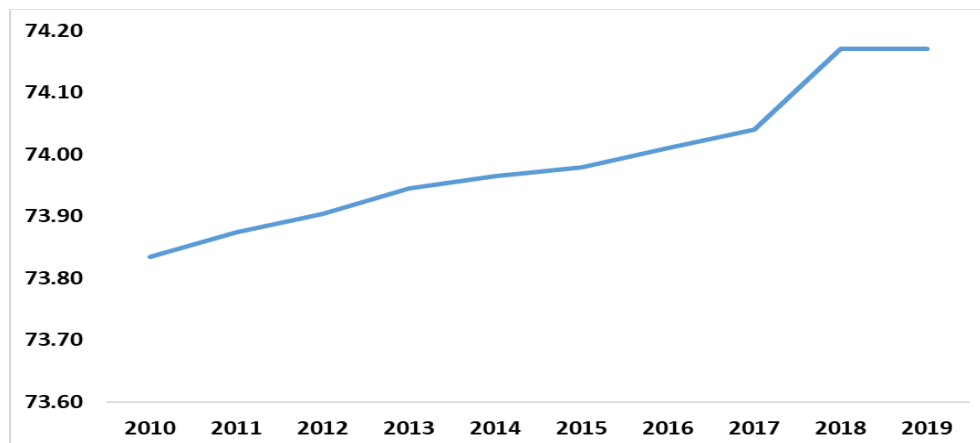
Angka/Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka/Umur Harapan Hidup dapat dijadikan acuan untuk program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup Kota Depok dari IPM tahun 2019 adalah 74,17 artinya bayi-bayi yang dilahirkan tahun 2019 rata-rata akan dapat hidup sampai usia 74 tahun atau lebih. Jika dilihat selama periode 2010 - 2015, angka harapan hidup Kota Depok senantiasa mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk di Depok senantiasa meningkat.

Tabel 3.30 Angka/Umur Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2010 – 2019

Tahun	Angka Harapan Hidup
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2010	73,09
2011	73,22
2012	73,34
2013	73,46
2014	73,75
2015	74,10
2016	74,01
2017	74,04
2018	74,17
2019	74,17

Sumber: Survei IPM Kota Depok Tahun 2019



Sumber: Survei IPM Kota Depok Tahun 2019

Gambar 3.6 Angka/Umur Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2010-2019

Untuk mengetahui status kesehatan penduduk dapat digunakan indikator antara lain angka kesakitan/morbiditas. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan di Kota Depok tahun 2019 yaitu 12,78 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk hidup sehat cukup tinggi. Jika digolongkan menurut jenis kelamin. Penduduk laki-laki lebih sedikit yang mengalami keluhan sakit dari pada perempuan.

Tabel 3.31 Angka Kesakitan/ Morbiditas Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2019

Indikator Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Angka Morbiditas	12.51	13.05	12.78

Sumber: Data Susenas 2019

Tabel 3.32 Angka Kesakitan/ Morbiditas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Sawangan	16.51	15.58	16.05
Bojongsari	12.95	12.98	12.96
Pancoran Mas	6.83	7.01	6.92
Cipayung	11.23	9.72	10.49
Sukmajaya	10.49	6.96	8.71
Cilodong	7.99	8.23	8.11
Cimanggis	7.92	10.02	8.96
Tapos	15.17	15.82	15.50
Beji	8.13	13.00	10.54
Limo	11.22	10.46	10.84
Cinere	15.98	15.29	15.63

Sumber: Data Susenas 2019

Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, ternyata angka morbiditasnya sangat bervariasi dan timpang. Angka morbiditas terendah di Kecamatan Pancoran Mas sebesar 6,92 persen. Disusul Kecamatan Cilodong dan Sukmajaya masing-masing sebesar 8,11 dan 8,71 persen. Sedangkan tertinggi ada di Kecamatan Sawangan sebesar 16,05 persen.

Angka kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan rata-rata jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Angka ini tidak dapat disamakan dengan proporsi penduduk yang mengunjungi atau kontak dengan pelayanan kesehatan. Angka kunjungan mengikuti pola kesakitan yang terjadi di masyarakat dan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.33 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018

Tempat Berobat Jalan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. RS Pemerintah	5,57	8,50	7,10
2. RS Swasta	17,98	15,44	16,65
3. Praktek Dokter/bidan	18,67	17,05	17,83
4. Klinik / Prakter Dokter Bersama	33,28	36,65	35,04
5. Puskesmas / Pustu	22,57	19,19	20,81
6. Puskesmas /Polindes/Posyandu/Balai Pengobatan	0,58	1,03	0,82
7. Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif	0,79	1,66	1,24
8. Lainnya	0,55	0,48	0,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Tabel 3.33 menunjukkan persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat. Berdasarkan ketersediaan data pada tahun 2018, sebagian besar penduduk Depok berobat jalan ke praktek dokter/ poliklinik, sebesar 35,04 persen. Ternyata masyarakat Depok sudah mulai menggunakan fasilitas puskesmas/pustu untuk berobat, hal ini dilihat dari tingkat partisipasinya sebesar 20,81 persen di urutan kedua. Sedangkan urutan terbesar selanjutnya adalah praktek dokter/bidan sebesar 17,83 persen. Jika dipisah secara gender, pola antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dalam menggunakan tempat/cara berobat.

Tabel 3.34 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Kecamatan dan Tempat/Cara Berobat di Kota Depok Tahun 2019

Kecamatan	Tempat Berobat Jalan						Jumlah
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek dokter bersama	Puskesmas / Pustu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
Sawangan	4.74	14.13	9.84	37.76	33.00	0.53	100.00
Bojongsari	13.74	14.14	19.45	26.26	25.21	1.20	100.00
Pancoran Mas	8.93	17.76	18.13	37.80	17.38	-	100.00
Cipayung	6.56	15.15	13.48	37.03	23.31	4.47	100.00
Sukmajaya	4.32	26.85	6.86	38.34	19.75	3.88	100.00
Cilodong	2.68	20.59	9.50	49.57	16.67	0.99	100.00
Cimanggis	11.23	13.58	15.45	37.39	21.74	0.61	100.00
Tapos	4.97	19.21	9.55	32.76	32.00	1.51	100.00
Beji	5.62	22.84	11.01	30.86	29.67	-	100.00
Limo	1.61	11.42	27.57	36.70	22.70	-	100.00
Cinere	11.10	20.71	9.36	30.17	28.67	-	100.00

Sumber: Data Susenas 2019

Apabila dilihat per Kecamatan berdasarkan data tahun 2019, sebagian besar hampir sama pola cara berobatnya, terbesar menggunakan praktek dokter poliklinik, disusul puskesmas/pustu dan rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Kecamatan Sukmajaya, setelah praktek dokter/poliklinik, ternyata masyarakatnya cenderung memilih rumah sakit swasta sebagai alternatif cara berobat terbesar kedua.

Berdasarkan data tahun 2018, pilihan warga Depok yang melakukan rawat inap terbesar di rumah sakit swasta 66,85 persen, disusul rumah sakit pemerintah sebesar 24,52 persen. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang tampak jelas karena alternatif rumah sakit swasta di Kota Depok dan sekitarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Selain itu bisa juga karena perbedaan jumlah atau kualitas pelayanan antara dua rumah sakit tersebut. Polanya hampir sama untuk tiap kecamatan, hanya nilai persentasenya yang bervariasi.

Tabel 3.35 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018

Tempat Rawat Inap	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. RS Pemerintah	22,28	26,07	24,52
2. RS Swasta	74,10	61,84	66,85
3. Praktek Dokter/bidan	1,84	4,55	3,44
4. Klinik / Prakter Dokter bersama	-	3,28	1,94
5. Puskesmas / Pustu	-	4,26	2,52
6. Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif	-	-	-
7. Lainnya	1,78	-	0,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Tabel 3.36 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Kecamatan dan Tempat Rawat Inap di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Tempat Rawat Inap					
	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktek dokter/ bidan	Klinik/ praktek dokter bersama	Puskesmas/ Pustu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sawangan	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bojongsari	54,55	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Pancoran Mas	22,73	63,64	4,55	0,00	9,09	0,00
Cipayung	26,67	60,00	6,67	0,00	0,00	6,67
Sukmajaya	23,53	73,53	0,00	2,94	0,00	0,00
Cilodong	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Cimanggis	31,82	63,64	0,00	0,00	4,55	0,00
Tapos	6,25	81,25	0,00	12,50	0,00	0,00
Beji	14,29	71,43	14,29	0,00	0,00	0,00
Limo	12,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cinere	27,27	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data Susenas 2018

Kesehatan Ibu dan balita adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Kesehatan ibu dan balita sangat dipengaruhi pada saat proses melahirkan. Penanganan saat melahirkan yang sesuai standar kesehatan akan menghindarkan ibu dan bayi dari resiko kematian. Layanan kesehatan yang memadai di Kota Depok dapat dilihat dari indikator penolong kelahiran. Berdasarkan data tahun 2018, dari Tabel 3.8 terlihat bahwa sebagian besar balita di Depok pada waktu dilahirkan ditolong oleh bidan (41,13 persen). Kemudian 58,01 persen lainnya oleh dokter kandungan, dan sisanya sekitar 0,87 persen ditolong oleh dokter umum. Namun demikian jika dilihat pada tiap Kecamatan polanya tidak semua sama. Pada

Kecamatan Pancoran Mas, Limo dan Cinere penggunaan bidan sebagai penolong kelahiran lebih besar dari pada dokter.

Tabel 3.37 Persentase Balita Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Penolong Persalinan			Jumlah
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sawangan	50,00	0,00	50,00	100,00
Bojongsari	50,00	0,00	50,00	100,00
Pancoran Mas	47,62	0,00	52,38	100,00
Cipayung	81,82	0,00	18,18	100,00
Sukmajaya	55,56	0,00	44,44	100,00
Cilodong	64,71	0,00	35,29	100,00
Cimanggis	66,67	0,00	33,33	100,00
Tapos	70,00	0,00	30,00	100,00
Beji	58,82	5,88	35,29	100,00
Limo	25,00	0,00	75,00	100,00
Cinere	37,50	0,00	62,50	100,00
Kota Depok	58,01	0,87	41,13	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Banyak sekali manfaat air susu ibu (ASI), diantaranya merupakan nutrisi paling sempurna dan seimbang, mengandung zat kekebalan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi bayi dari bahaya diare dan infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu, ASI tersedia setiap saat sehingga sangat praktis dan ekonomis, mempererat emosional ibu dan bayinya sehingga sangat positif dampaknya bagi perkembangan psikologisnya. Pemerintah dan organisasi internasional sepakat untuk mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi setidaknya tahun pertama dan bahkan lebih lama lagi, antara lain WHO.

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, UNICEF dan WHO merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui ASI selama paling sedikit enam bulan. Makanan tambahana seharusnya diberikan sesudah anak berusia enam bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun (WHO-2005). Selain itu UNICEF dan WHO juga merekomendasikan pemberian ASI eksklusif (ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun) sampai bayi berusia 6 bulan. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif dari 4 bulan menjadi 6 bulan.

Tabel 3.38 Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Menyusui di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Lamanya Disusui (Bulan)				Jumlah
	1-5	6-11	12-17	18-23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sawangan	-	50,00	25,00	25,00	100,00
Bojongsari	50,00	25,00	25,00	-	100,00
Pancoran Mas	40,00	-	26,67	33,33	100,00
Cipayung	-	42,86	14,29	42,86	100,00
Sukmajaya	20,69	48,28	24,14	6,90	100,00
Cilodong	33,33	33,33	33,33	-	100,00
Cimanggis	50,00	25,00	-	25,00	100,00
Tapos	11,11	33,33	22,22	33,33	100,00
Beji	20,00	40,00	26,67	13,33	100,00
Limo	-	-	50,00	50,00	100,00
Cinere	16,67	50,00	-	33,33	100,00
Kota Depok	22,50	35,00	20,63	21,88	100,00

Sumber: Data Susenas 2018

Dari Tabel 3.38 dapat dilihat bahwa kesadaran ibu untuk memberikan ASI kepada anak sampai genap usia 2 tahun masih relatif kecil, yaitu 21,88 persen. Sementara itu masih terdapat 22,50 persen balita yang mendapat ASI kurang dari 6 bulan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kondisi ibu yang bekerja atau lainnya. Sesuai dengan program organisasi kesehatan dunia WHO, pemerintah mewajibkan lima jenis imunisasi bagi anak-anak, yang disebut Program Pengembangan Imunisasi (PPI). Sedangkan tujuh jenis lainnya dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit. Wajib itu artinya semua anak yang tinggal di Indonesia wajib diberikan lima jenis imunisasi untuk mencegah tujuh jenis penyakit (IDAI).

Tingkat imunisasi wajib pada balita di Kota Depok sudah sangat tinggi mencapai 98,40 persen, meliputi 98,10 persen balita laki-laki dan 98,71 persen balita perempuan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksin imunisasi sudah cukup tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Depok dalam program kesehatan seperti posyandu. Sedangkan balita yang tidak diimunisasi kemungkinan karena perbedaan pendapat mengenai imunisasi itu sendiri.

Tabel 3.39 Persentase Balita Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Pernah Tidaknya Diimunisasi di Kota Depok Tahun 2018

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	Imunisasi	Tidak Imunisasi	Imunisasi	Tidak Imunisasi	Imunisasi	Tidak Imunisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sawangan	84,00	16,00	85,71	14,29	84,86	15,14
Bojongsari	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Pancoran Mas	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Cipayung	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Sukmajaya	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Cilodong	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Cimanggis	100,00	-	94,74	5,26	97,37	2,63
Tapos	95,00	5,00	100,00	-	97,50	2,50
Beji	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Limo	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Cinere	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Kota Depok	98,10	1,90	98,71	1,29	98,40	1,60

Sumber: Data Susenas 2018

3.5. Ekonomi

3.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor – faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp. 64.292,1 triliun. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp. 58.344,5 triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami kenaikan sebesar 6,83 persen pada tahun 2018. tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.

Tabel 3.40 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Rp Miliar)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	774.71	819.34	891.63
b.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
c.	Industri Pengolahan	17,265.07	18,162.69	19,254.42
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	150.71	180.15	190.29
e.	Peng. Air, Peng. Sampah, Limbah, & Daur Ulang	37.36	42.67	49.06
f.	Konstruksi	9,893.06	11,266.20	12,956.65
g.	Perd. Besar & Eceran; Reparasi & Per. Mobil & Spd Motor	11,522.52	12,691.41	14,010.80
h.	Transportasi dan Pergudangan	2,456.99	2,649.12	2,848.28
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,908.46	2,190.08	2,477.48
j.	Informasi dan Komunikasi	938.37	1,082.90	1,168.69
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,187.22	2,365.35	2,682.71
l.	Real Estat	822.24	916.35	1,031.12
m,n.	Jasa Perusahaan	107.52	119.30	126.26
o.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1,444.51	1,534.07	1,656.30
p.	Jasa Pendidikan	1,391.78	1,591.39	1,887.31
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	553.48	627.42	687.51
r,s,t,u.	Jasa Lainnya	1,877.05	2,106.07	2,373.61
	PDRB ADHB	53,331.05	58,344.49	64,292.10

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Tabel 3.41 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.08	1.58	2.58
b.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
c.	Industri Pengolahan	4.27	3.18	4.04
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.94	4.44	3.60
e.	Peng. Air, Peng. Sampah, Limbah, & Daur Ulang	5.68	6.90	6.09
f.	Konstruksi	9.44	9.94	10.11
g.	Perd. Besar & Eceran; Reparasi & Per. Mobil & Spd Motor	8.31	7.42	7.16
h.	Transportasi dan Pergudangan	6.69	5.41	5.61
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.77	10.37	9.13
j.	Informasi dan Komunikasi	14.23	13.37	9.99
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.91	4.22	9.87
l.	Real Estat	8.15	10.11	6.22
m,n.	Jasa Perusahaan	6.92	9.13	1.85
o.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.02	3.13	2.32
p.	Jasa Pendidikan	8.34	9.38	7.36
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.28	9.69	6.48
r,s,t,u.	Jasa Lainnya	9.91	10.09	8.42
	PDRB ADHK 2010	7.28	6.65	6.83

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Tabel 3.42 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2016–2018 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.45	1.40	1.39
b.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
c.	Industri Pengolahan	32.37	31.13	29.95
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.28	0.31	0.30
e.	Peng. Air, Peng. Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0.07	0.07	0.08
f.	Konstruksi	18.55	19.31	20.15
g.	Perd. Besar & Eceran; Reparasi & Per. Mobil & Spd Motor	21.61	21.75	21.79
h.	Transportasi dan Pergudangan	4.61	4.54	4.43
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.58	3.75	3.85
j.	Informasi dan Komunikasi	1.76	1.86	1.82
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.10	4.05	4.17
l.	Real Estat	1.54	1.57	1.60
m,n.	Jasa Perusahaan	0.20	0.20	0.20
o.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.71	2.63	2.58
p.	Jasa Pendidikan	2.61	2.73	2.94
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.04	1.08	1.07
r,s,t,u.	Jasa Lainnya	3.52	3.61	3.69
	PDRB ADHB	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Depok, 2019

Empat kecamatan di Kota Depok yang mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2018 atas dasar harga berlaku adalah Kecamatan Cimanggis (27,04 persen), Kecamatan Cilodong (20,15 persen), Kecamatan Tapos (11,09 Persen), serta Kecamatan Beji (9,87 persen). Tujuh kecamatan lainnya masing-masing mempunyai *sharing* di bawah 8 persen, yaitu Pancoran Mas (7,88 persen), Sukmajaya (6,82 persen), Sawangan (5,43 persen), Cinere (3,45 persen), Bojongsari (3,10 persen), Limo (2,88 persen), dan Cipayung (2,29 persen).

Sharing masing-masing kecamatan pada pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2018 atas dasar harga konstan tahun 2010 juga memperlihatkan pola yang hampir sama. Hal ini memperlihatkan bahwa semua kecamatan di Kota Depok tidak mengalami perbedaan harga berlaku yang mencolok. Karena PDRB atas dasar harga konstan secara riil menggambarkan produksi dari setiap sektor ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Karena PDRB Kecamatan yang dihitung menggunakan pendekatan produksi, maka besaran PDRB Kecamatan menggambarkan besaran produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam wilayah kecamatan tersebut. Sehingga besaran nilai PDRB Kecamatan ini belum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan, namun dapat menggambarkan produksi barang dan jasa akhir yang dibangkitkan dalam

setiap kecamatan. Nilai PDRB Kecamatan yang besar menunjukkan bahwa di kecamatan itu banyak terjadi proses produksi barang dan jasa akhir.

Secara umum ada tiga kategori lapangan usaha yang berperan dominan pada pembentukan PDRB di masing-masing kecamatan, yaitu kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta kategori konstruksi. Seluruh kecamatan di Kota Depok, kecuali Cilodong, Cimanggis, Tapos, dan Sawangan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kategori yang paling dominan di setiap kecamatan. Khusus untuk Kecamatan Cilodong dan Tapos, sektor yang paling dominan adalah sektor industri pengolahan. Dominannya sektor industri pengolahan pada kedua kecamatan ini karena, pada kedua kecamatan ini terdapat industri skala besar yang jumlahnya cukup banyak. Atau dengan kata lain, industri besar di Kota Depok letaknya terkonsentrasi pada dua kecamatan ini. Sedangkan kecamatan dengan kategori konstruksi adalah Kecamatan Sawangan dan Cimanggis.

Sub kategori industri pengolahan yang dominan di Kecamatan Cilodong adalah industri makanan dan minuman, serta industri mesin dan perlengkapan YTDL. Sedangkan di Kecamatan Tapos industri pengolahan yang dominan adalah industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, serta industri karet, barang dari karet dan plastik.

1. Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan merupakan kecamatan di Kota Depok yang produksi pertaniannya paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Depok. *Sharing* kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dibangkitkan oleh Kecamatan Sawangan terhadap PDRB Kota Depok Tahun 2018 adalah sebesar 17,39 persen. Ini merupakan *sharing* tertinggi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertanian yang diusahakan di Sawangan masih cukup berimbang antara tanaman bahan makanan, peternakan dan perikanan.

Dua kategori yang paling dominan di Kecamatan Sawangan adalah konstruksi (44,19 persen) dan perdagangan, hotel dan restoran (20,00 persen). Industri pengolahan yang paling dominan adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, atau yang dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk pada kode 16.

2. Kecamatan Bojongsari

Kategori lapangan usaha di Kecamatan Bojongsari yang mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (16,32 persen). Tanaman perkebunan dan perikanan merupakan kegiatan pertanian yang banyak diusahakan di Kecamatan Bojongsari. Bahkan lebih dari 30 persen kegiatan perikanan yang ada di Kota Depok di usahakan di Kecamatan Bojongsari. Industri furnitur menjadi sub kategori industri pengolahan yang mendominasi kegiatan industri di Kecamatan Bojongsari.

3. Kecamatan Pancoran Mas

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kategori ekonomi yang sangat dominan di Kecamatan Pancoran Mas. Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap pembentukan PDRB Kecamatan Pancoran Mas sebesar 37,08 persen, sedangkan secara sektoral kontribusi kategori ini terhadap Kota Depok adalah sebesar 13,40 persen. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu sentra perdagangan di Kota Depok bersama dengan Kecamatan Beji, Cilodong dan Cimanggis.

Industri pengolahan tidak menjadi kategori basis ekonomi di Kecamatan Pancoran Mas. Namun industri yang sangat menonjol di Kecamatan Pancoran Mas adalah industri makanan dan minuman.

4. Kecamatan Cipayung

Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Pancoran Mas ini secara ekonomi didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (38,26 persen) dan sektor industri pengolahan (18,63 persen). Industri pengolahan yang sangat mendominasi adalah industri tekstil, dan pakaian jadi. Nilai tambah yang dihasilkan dari industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki menyumbang lebih dari 60 persen dari total nilai tambah kategori industri pengolahan di Kecamatan Cipayung.

5. Kecamatan Sukmajaya

Basis ekonomi di Kecamatan Sukmajaya terletak pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori industri pengolahan. Andil kategori industri pengolahan sebesar 19,29 persen, sedangkan andil kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 32,46 persen.

Dua sub kategori industri pengolahan yang banyak dibangkitkan di Kecamatan Sukmajaya adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional serta Industri Makanan dan Minuman. Jika dilihat peranan secara sektoral terhadap pembentukan PDRB Kota Depok, maka kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempunyai andil sektoral yang terbesar dari Sukmajaya, yaitu sebesar 28,14 persen.

6. Kecamatan Cilodong

Peranan kategori industri pengolahan di Kecamatan Cilodong sangat besar, karena mempunyai andil sebesar 64,03 persen. Kategori kedua yang mempunyai andil besar terhadap perekonomian Kecamatan Cilodong adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,87 persen). Kedua kategori ini jika digabungkan maka akan mempunyai andil sebesar 80,90 persen di Kecamatan Cilodong. Jika dilihat *sharing* per sub kategori ekonomi, maka industri pengolahan di Kecamatan Cilodong mempunyai *sharing* sektoral terhadap PDRB Kota Depok sebesar 43,08 persen.

7. Kecamatan Cimanggis

Secara makro, Kecamatan Cimanggis mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. PDRB Kota Depok pada Tahun 2018 sebesar 27,04 persennya dibentuk oleh unit-unit produksi yang ada di Kecamatan Cimanggis. Secara sektoral kategori konstruksi dan kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil yang besar terhadap PDRB Kota Depok. *Sharing* transportasi dan pergudangan di Kecamatan Cimanggis terhadap transportasi dan pergudangan di Kota Depok sebesar 48,10 persen, sedangkan *sharing* kategori konstruksinya sebesar 54,97 persen.

Industri pengolahan yang paling mendominasi adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki, disusul industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatannya.

8. Kecamatan Tapos

Besaran PDRB Kecamatan Tapos Tahun 2018 yang mencapai Rp 7,13 Triliun, atau menempati ranking 3 di Kota Depok, meskipun IPM nya peringkat 10 dari 11 dan kemiskinannya peringkat 6 terbesar di Kota Depok, semakin menguatkan teorema bahwa besarnya PDRB belum tentu bisa menggambarkan kesejahteraan. Besarnya PDRB Kecamatan Tapos Tahun 2018 karena banyaknya industri besar yang beroperasi di Kecamatan Tapos. Industri pengolahan berperan sebesar 58,79 persen terhadap ekonomi Kecamatan Tapos. Sub kategori industri pengolahan yang dominan di Kecamatan Tapos, yaitu industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik.

Selain kategori industri pengolahan, kategori lainnya yang dominan dalam perekonomian Kecamatan Tapos adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sebesar 20,10 persen.

9. Kecamatan Beji

PDRB Kota Depok Tahun 2018 di Kategori Jasa Perusahaan 25,73 persennya dibangkitkan oleh unit-unit usaha Jasa Perusahaan yang berada di Kecamatan Beji. Selain Kategori Jasa Perusahaan yang mempunyai *sharing* sektoral tinggi terhadap PDRB Kota Depok, kategori jasa keuangan dan asuransi mempunyai *share* sebesar 23,82 persen, sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai *share* sebesar 14,89 persen.

Ekonomi di Kecamatan Beji sendiri didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (32,87 persen), kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,68 persen), dan kategori konstruksi (11,95 persen). Industri makanan dan minuman merupakan industri yang lebih dominan dibandingkan industri lainnya yang ada di Kecamatan Beji.

10. Kecamatan Limo

Kecamatan Limo merupakan kecamatan di Kota Depok yang pada Tahun 2018 mempunyai nilai PDRB Kecamatan kedua terkecil setelah Kecamatan Cipayung. Peranan

PDRB Kecamatan Limo terhadap PDRB Kota Depok hanya sekitar 2,88 persen. *Sharing* sektoral tertinggi ada di kategori real estate, dan itu pun hanya sebesar 8,56 persen.

Secara struktur, ekonomi di Kecamatan Limo di dominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (28,07 persen), kategori industri pengolahan (17,49 persen), dan kategori jasa keuangan dan asuransi (12,25 persen). Industri yang paling dominan di Kecamatan Limo adalah industri Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.

11. Kecamatan Cinere

Tingkat kemiskinan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Cinere merupakan salah satu yang terbaik di Kota Depok. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa Cinere merupakan kecamatan dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang cukup baik di Kota Depok. Namun ternyata PDRB Kecamatan Cinere pada tahun 2018 menempati peringkat 8 dari 11 kecamatan di Kota Depok. PDRB per kapita pada tahun 2018 pun ada di peringkat 8. Keadaan yang terjadi di Kecamatan Cinere ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Kecamatan Tapos.

Di Kecamatan Cinere memang tidak banyak terdapat unit-unit usaha yang melakukan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akhir. Di Kecamatan Cinere lebih banyak dijumpai rumah dan perumahan untuk penduduk kelas menengah ke atas. Ekonomi di Kecamatan Cinere didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (38,03 persen), serta kategori konstruksi (19,29 persen). Untuk kategori industri pengolahan yang dominan adalah industri Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman.

Tabel 3.43 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	010 Sawangan	011 Bojongsari	020 Pancoran Mas	021 Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155,091.33	145,506.84	120,905.83	68,043.31
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	374,849.65	413,968.07	299,156.11	274,545.75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,525.13	10,916.18	23,041.21	14,000.81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,061.01	584.74	22,055.02	564.72
F	Konstruksi	1,541,225.80	141,337.02	200,491.95	192,828.64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	697,550.13	858,246.24	1,877,400.46	563,713.88
H	Transportasi dan Pergudangan	79,906.63	92,852.76	125,349.25	73,981.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,307.65	112,662.06	278,703.93	109,480.37
J	Informasi dan Komunikasi	24,182.29	16,101.19	501,897.50	25,521.38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,521.52	38,344.94	324,934.35	2,740.02
L	Real Estat	201,961.35	38,565.13	162,479.96	27,085.37
M,N	Jasa Perusahaan	4,927.92	1,950.81	19,201.08	1,611.98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,730.35	7,935.76	26,799.47	8,138.74
P	Jasa Pendidikan	69,592.84	61,108.69	251,428.57	68,361.42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,667.93	3,452.32	120,450.24	3,873.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	70,799.54	51,265.50	708,893.20	38,910.35
	PDRB (Juta Rp)	3,487,901.05	1,994,798.23	5,063,188.15	1,473,401.40
	Penduduk Tengah Tahun	165,631	133,682	282,167	171,457
	PDRB Per Kapita (Rp)	21,058,262.36	14,921,965.82	17,943,941.53	8,593,416.45

*) Angka Sementara

Tabel 3.43 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	72,296.08	42,314.51	44,096.17	123,445.62
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	846,208.15	8,295,403.60	3,616,491.51	4,191,189.46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,426.66	13,683.09	26,485.17	23,665.24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,806.06	2,477.11	3,635.60	1,087.50
F	Konstruksi	269,874.62	1,875,951.57	7,122,042.22	248,423.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,424,315.57	1,927,084.29	1,780,904.48	1,432,519.66
H	Transportasi dan Pergudangan	205,769.40	256,392.36	1,369,986.06	352,222.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	258,045.25	175,369.15	454,060.40	289,017.69
J	Informasi dan Komunikasi	57,339.07	27,773.13	350,900.14	38,220.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	80,561.32	119,183.32	1,120,054.46	42,987.92
L	Real Estat	112,555.48	30,873.61	86,339.34	96,535.78
M,N	Jasa Perusahaan	10,846.27	5,634.40	28,585.48	11,895.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	236,158.96	15,941.47	94,051.50	60,049.46
P	Jasa Pendidikan	121,593.03	57,791.84	824,201.72	82,094.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,439.89	13,773.12	305,892.78	7,400.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	620,500.66	96,090.45	156,427.54	127,742.71
	PDRB (Juta Rp)	4,387,736.46	12,955,737.03	17,384,154.58	7,128,497.53
	Penduduk Tengah Tahun	311,379	167,565	324,343	289,809
	PDRB Per Kapita (Rp)	14,091,304.99	77,317,679.89	53,598,056.94	24,597,226.22

*) Angka Sementara

Tabel 3.43 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,933.52	60,534.12	14,465.25	891,632.58
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	417,094.11	324,184.80	201,330.24	19,254,421.45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,158.49	9,626.65	11,761.80	190,290.42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,004.60	765.85	2,018.53	49,060.75
F	Konstruksi	758,236.38	178,498.01	427,739.43	12,956,648.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,085,514.35	520,352.79	843,197.19	14,010,799.05
H	Transportasi dan Pergudangan	132,378.80	89,742.49	69,665.45	2,848,247.25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433,736.16	89,560.43	157,532.42	2,477,475.51
J	Informasi dan Komunikasi	66,919.11	23,455.45	36,379.55	1,168,689.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	638,945.48	229,207.96	80,231.06	2,682,712.35
L	Real Estat	132,205.60	88,229.58	54,292.54	1,031,123.75
M,N	Jasa Perusahaan	32,480.07	4,434.81	4,689.26	126,257.41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,185,141.21	6,376.47	976.33	1,656,299.71
P	Jasa Pendidikan	159,584.67	65,820.41	125,736.89	1,887,314.51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,810.05	2,139.60	62,613.15	687,512.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	217,265.33	160,988.19	124,727.08	2,373,610.55
	PDRB (Juta Rp)	6,345,407.93	1,853,917.59	2,217,356.18	64,292,096.15
	Penduduk Tengah Tahun	222,372	117,890	144,038	2,330,333
	PDRB Per Kapita (Rp)	28,535,103.04	15,725,825.69	15,394,244.46	27,589,231.30

*) Angka Sementara

Tabel 3.44 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	010 Sawangan	011 Bojongsari	020 Pancoran Mas	021 Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	91,028.61	83,796.61	71,619.25	40,686.38
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	264,654.00	294,383.59	212,122.98	196,515.62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,782.64	7,088.50	14,961.97	9,091.53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	743.88	409.97	15,462.92	395.93
F	Konstruksi	1,145,389.25	105,037.11	148,999.15	143,304.02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	494,557.47	608,592.56	1,319,319.77	400,447.22
H	Transportasi dan Pergudangan	45,113.11	53,002.17	71,641.70	41,860.89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75,351.80	71,145.48	176,026.85	69,128.60
J	Informasi dan Komunikasi	25,208.41	16,784.41	523,194.46	26,604.33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,668.32	24,762.45	219,775.13	1,868.72
L	Real Estat	155,048.90	29,607.06	124,738.42	20,793.87
M,N	Jasa Perusahaan	3,949.57	1,563.51	15,389.06	1,291.95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,100.13	4,902.56	16,556.21	5,027.96
P	Jasa Pendidikan	48,299.04	42,410.85	174,497.25	47,444.41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,020.93	2,582.25	90,093.94	2,897.07
R,S,T,U	Jasa lainnya	55,924.06	40,494.26	559,949.75	30,735.01
	PDRB (Juta Rp)	2,511,840.13	1,386,563.33	3,754,348.81	1,038,093.50
	Penduduk Tengah Tahun	165,631	133,682	282,167	171,457
	PDRB Per Kapita (Rp)	15,165,277.82	10,372,101.89	13,305,414.20	6,054,541.37

*) Angka Sementara

Tabel 3.44 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,091.26	24,676.28	25,715.28	72,460.71
B	Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	612,108.29	5,879,925.76	2,633,280.02	3,068,600.81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,510.97	8,885.21	17,198.33	15,367.19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,679.52	1,736.72	2,548.95	762.46
F	Konstruksi	200,562.10	1,394,146.64	5,292,871.83	184,620.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,009,189.32	1,337,776.16	1,257,640.42	1,018,313.39
H	Transportasi dan Pergudangan	117,247.76	145,543.09	774,338.38	199,171.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163,883.11	110,767.06	287,085.69	182,685.96
J	Informasi dan Komunikasi	59,772.13	28,951.63	365,789.85	39,842.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,475.70	76,441.48	777,250.35	27,632.22
L	Real Estat	86,410.62	23,702.16	66,284.07	74,112.04
M,N	Jasa Perusahaan	8,692.94	4,515.80	22,910.36	9,533.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	145,894.58	9,848.34	58,103.26	37,097.43
P	Jasa Pendidikan	84,388.38	40,108.87	572,015.09	56,975.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,264.27	10,301.97	228,800.58	5,535.51
R,S,T,U	Jasa lainnya	490,129.10	75,901.17	123,561.01	100,903.07
	PDRB (Juta Rp)	3,126,300.06	9,173,228.34	12,505,393.46	5,093,613.41
	Penduduk Tengah Tahun	311,379	167,565	324,343	289,809
	PDRB Per Kapita (Rp)	10,040,176.30	54,744,298.25	38,556,076.31	17,575,759.94

*) Angka Sementara

Tabel 3.44 Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Juta Rp)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,791.43	35,956.74	8,526.09	524,348.65
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	296,955.19	227,333.90	141,838.20	13,827,718.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,791.34	6,251.13	7,637.60	123,566.40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	704.33	536.94	1,415.21	34,396.82
F	Konstruksi	563,496.80	132,653.95	317,882.13	9,628,962.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,467,328.81	368,952.29	591,339.41	9,873,456.80
H	Transportasi dan Pergudangan	76,733.16	51,209.49	39,378.97	1,615,239.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277,846.64	56,566.58	99,543.10	1,570,030.88
J	Informasi dan Komunikasi	69,758.68	24,450.73	37,923.24	1,218,280.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	440,416.56	157,744.84	55,441.06	1,839,476.83
L	Real Estat	101,496.32	67,735.24	41,681.23	791,609.93
M,N	Jasa Perusahaan	26,031.75	3,554.36	3,758.30	101,191.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	732,158.03	3,939.26	603.16	1,023,230.93
P	Jasa Pendidikan	110,755.46	45,680.89	87,264.31	1,309,840.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,313.40	1,600.37	46,833.16	514,243.46
R,S,T,U	Jasa lainnya	171,616.36	127,163.44	98,521.04	1,874,898.26
	PDRB (Juta Rp)	4,390,194.26	1,311,330.15	1,579,586.22	45,870,491.66
	Penduduk Tengah Tahun	222,372	117,890	144,038	2,330,333
	PDRB Per Kapita (Rp)	19,742,567.66	11,123,336.62	10,966,454.81	19,684,093.07

*) Angka Sementara

Tabel 3.45 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Persen)

No	Lapangan Usaha	010 Sawangan	011 Bojongsari	020 Pancoran Mas	021 Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.45	7.29	2.39	4.62
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	10.75	20.75	5.91	18.63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.39	0.55	0.46	0.95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.44	0.04
F	Konstruksi	44.19	7.09	3.96	13.09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.00	43.02	37.08	38.26
H	Transportasi dan Pergudangan	2.29	4.65	2.48	5.02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.42	5.65	5.50	7.43
J	Informasi dan Komunikasi	0.69	0.81	9.91	1.73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.16	1.92	6.42	0.19
L	Real Estat	5.79	1.93	3.21	1.84
M,N	Jasa Perusahaan	0.14	0.10	0.38	0.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.42	0.40	0.53	0.55
P	Jasa Pendidikan	2.00	3.06	4.97	4.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.26	0.17	2.38	0.26
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.03	2.57	14.00	2.64
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

Tabel 3.45 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Persen)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.65	0.33	0.25	1.73
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	19.29	64.03	20.80	58.79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.58	0.11	0.15	0.33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.31	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	6.15	14.48	40.97	3.48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.46	14.87	10.24	20.10
H	Transportasi dan Pergudangan	4.69	1.98	7.88	4.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.88	1.35	2.61	4.05
J	Informasi dan Komunikasi	1.31	0.21	2.02	0.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.84	0.92	6.44	0.60
L	Real Estat	2.57	0.24	0.50	1.35
M,N	Jasa Perusahaan	0.25	0.04	0.16	0.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.38	0.12	0.54	0.84
P	Jasa Pendidikan	2.77	0.45	4.74	1.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.11	1.76	0.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.14	0.74	0.90	1.79
	PDRB (Juta Rp)	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

Tabel 3.45 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018*) (Persen)

Tabel lanjutan

No	Lapangan Usaha	050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.71	3.27	0.65	1.39
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	6.57	17.49	9.08	29.95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.29	0.52	0.53	0.30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.04	0.09	0.08
F	Konstruksi	11.95	9.63	19.29	20.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.87	28.07	38.03	21.79
H	Transportasi dan Pergudangan	2.09	4.84	3.14	4.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.84	4.83	7.10	3.85
J	Informasi dan Komunikasi	1.05	1.27	1.64	1.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.07	12.36	3.62	4.17
L	Real Estat	2.08	4.76	2.45	1.60
M,N	Jasa Perusahaan	0.51	0.24	0.21	0.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.68	0.34	0.04	2.58
P	Jasa Pendidikan	2.51	3.55	5.67	2.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.34	0.12	2.82	1.07
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.42	8.68	5.63	3.69
	PDRB (Juta Rp)	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

3.5.2. Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Sebagai kebutuhan dasar manusia, makanan haruslah dipenuhi oleh siapapun. Pada golongan rumah tangga dengan penghasilan rendah, kebutuhan yang diutamakan untuk dicukupi adalah makanan, jika ada sisa baru memenuhi kebutuhan pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb. Pengeluaran rumah tangga golongan ini sebagian besar untuk konsumsi makanan.

Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran. Artinya rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi yang telah dapat mencukupi kebutuhan makanan akan dapat mengalokasikan sisa penghasilan mereka untuk kebutuhan lainnya. Kebutuhan makanan manusia yang terbatas akan menyisakan banyak penghasilan rumah tangga pada golongan rumah tangga berpenghasilan tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhan non makanan lebih banyak lagi.

Dengan kata lain, rumah tangga semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Rumah tangga golongan ini lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, dan keperluan pesta dan semisalnya.

Oleh karena itu seharusnya penghasilanlah yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bisa dipenuhi masih kebutuhan pokok yaitu makanan. Akan tetapi karena data tentang pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh, maka pengeluaran rumah tangga merupakan pendekatan (*proxy*) dari pendapatan.

Tabel 3.46 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kota Depok Tahun 2019

Tahun	Makanan (Rp)	% Makanan	Non Makanan (Rp)	% Non Makanan	Makanan + Non Makanan (Rp)	% Makanan + Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	828,172	40.84	1,199,812	59.16	2,027,984	100.00

Sumber: Data Susenas 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran rumah tangga masyarakat Kota Depok tahun 2019 lebih besar pada non makanan, dengan perbandingan sekitar dua banding tiga. Hal ini dapat dijelaskan sebagian pengeluaran masyarakat khususnya golongan pendapatan menengah ke atas mengalokasikan pengeluarannya ke barang non makanan seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama, pakaian, alas kaki dan penutup kepala serta keperluan pesta dan semisalnya. Angka yang menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan rumah tangga hampir 60 persen mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif sudah bagus.

BAB IV

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK

4.1. Umum

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri; (1) sehat dan berumur panjang; (2) cerdas, kreatif dan trampil, terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*Enlarging the choices of people*). Terdapat tiga pilihan dari sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) bukan satu-satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berkualitas.

Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan dan berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (*life expectancy rate*), mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, trampil, terdidik dan bertaqwa. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Dari hasil kegiatan Survei IPM Tahun 2019 dapat menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga data Survei IPM Tahun 2008 dapat dipergunakan untuk menghitung IPM Kota Depok Tahun 2019. Namun demikian angka

IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya.

IPM Kota Depok Tahun 2019 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 80,98. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 74,17 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2018 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 74,17 tahun. Rata-rata lama sekolah 11,05 tahun artinya masyarakat kota Depok yang berumur 25 tahun keatas rata-rata lama sekolah selama 11,05 tahun atau sampai dengan kelas 2 SMA, rata-rata harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas sebesar 14,34 tahun artinya penduduk berumur 7 tahun keatas mempunyai harapan akan bersekolah sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi pengeluaran per kapita sebesar Rp. 15.291 ribu per tahun artinya bahwa masyarakat kota Depok tahun 2019 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar Rp. 15.291 ribu setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

**Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok
Tahun 2016 – 2019***

Tahun	IPM	UHH (Tahun)	EYS (Harapan Lama Sekolah, Tahun)	MYS (Rata-rata Lama Sekolah, Tahun)	Pengeluaran (Rp. Ribu)
2016	79.60	74.01	13.86	10.76	Rp. 14,560.00
2017	79.83	74.04	13.87	10.84	Rp. 14,727.00
2018	80.29	74.17	13.90	10.85	Rp. 15,262.00
2019*	80.98	74.17	14.34	11.05	Rp. 15,291.62

Sumber :BPS, Survei IPM Kota Depok 2019 *) Angka Sementara

Tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun tahun mendatang. Masih diperlukan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Jangan sampai terjadi di Kota Depok yang mempunyai IPM tinggi di Jawa Barat tetapi masih hal hal yang tidak mencerminkan hal di atas seperti putus sekolah, ketidakberdayaan masyarakat dalam berobat, dan lain-lain. Mereka adalah harapan di masa depan yang harus kita perjuangkan di masa kini. Modal sosial dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diharapkan untuk membangun Kota Depok yang tercinta ini.

4.3. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup di sebelas kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi. Walaupun secara umum sudah mencapai tingkat harapan hidup yang tinggi. Secara keseluruhan kota Depok mempunyai angka harapan hidup waktu lahir di tahun 2019 sebesar 74,17 tahun. Artinya warga Kota Depok yang lahir di tahun 2019 mempunyai harapan hidup lebih dari 74,17 tahun.

Tingginya umur harapan hidup di kota Depok sangat ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan serta ditunjang dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok di masa yang akan datang.

Umur Harapan Hidup (UHH) kecamatan yang paling tinggi adalah umur harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 77,41 dan yang paling rendah adalah umur harapan hidup di Kecamatan Cipayung sebesar 70,49. Dari umur harapan hidup ini maka pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas kesehatan di Kecamatan Cipayung tanpa meninggalkan kecamatan yang lain.

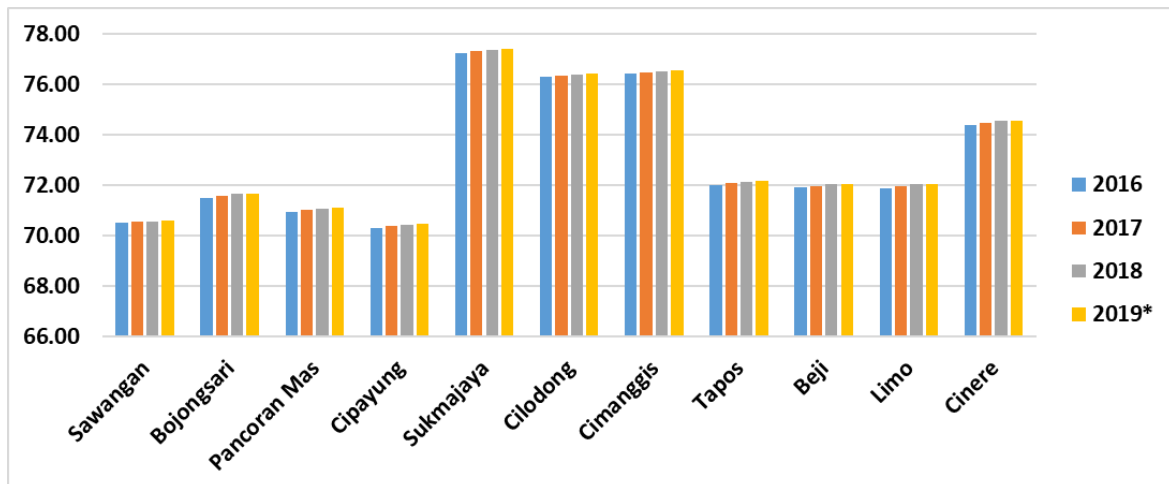
Kemajuan atau peningkatan umur harapan hidup di setiap kecamatan sangat ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggiatkan program Posyandu dan RW siaga. Posyandu merupakan kepanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan giatnya kegiatan Posyandu diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap umur harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di sekolah-sekolah kepada murid-murid misalnya dengan pemilahan sampah.

Tabel 4.2 Umur Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019*
1.	Sawangan	70.54	70.56	70.59	70.62
2.	Bojongsari	71.53	71.60	71.67	71.70
3.	Pancoran Mas	70.97	71.02	71.07	71.10
4.	Cipayung	70.32	70.39	70.46	70.49
5.	Sukmajaya	77.26	77.32	77.38	77.41
6.	Cilodong	76.30	76.34	76.39	76.42
7.	Cimanggis	76.43	76.48	76.54	76.57
8.	Tapos	72.01	72.08	72.15	72.18
9.	Beji	71.94	71.99	72.04	72.08
10.	Limo	71.90	71.97	72.05	72.07
11.	Cinere	74.40	74.48	74.55	74.58
Kota Depok		74.01	74.04	74.17	74.17

*) Angka Sementara



*) Angka Sementara

Gambar 4.1 Umur Harapan Hidup Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

Kondisi yang mengurangi derajat kesehatan masyarakat perkotaan yang tidak kalah penting adalah terpaparnya polusi asap kendaraan bermotor. Alangkah sehatnya apabila udara di Kota Depok bebas dari polusi udara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah Kota Depok antara lain dengan pembatasan kendaraan bermotor yang berpolusi dengan adanya Uji Emisi gas buang kendaraan. Apabila hal ini sudah terlaksana bisa lebih ditingkatkan lagi.

4.4. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

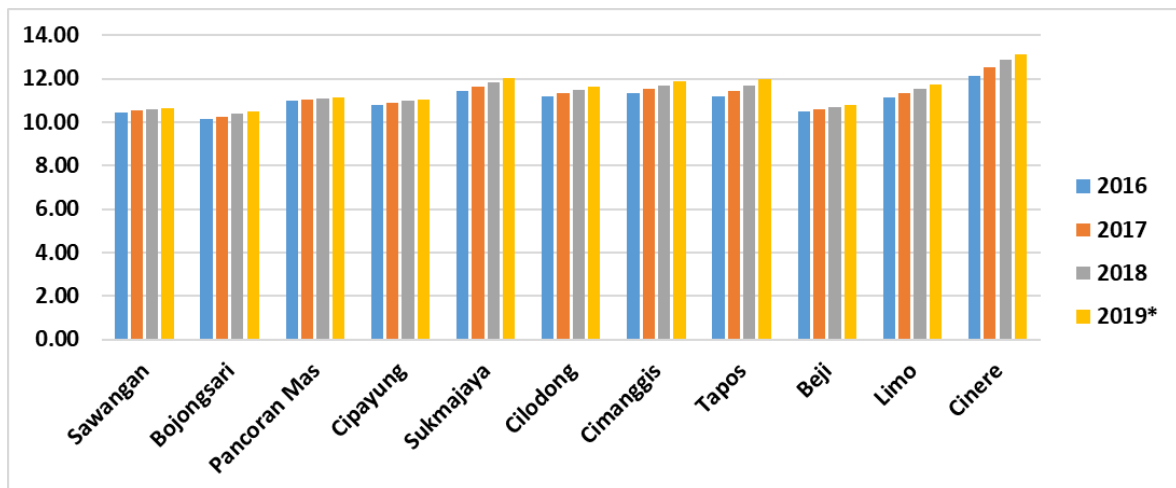
Rata-rata lama sekolah untuk masyarakat kota Depok berumur 25 tahun keatas tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi ada di Kecamatan Cinere mencapai 13,13 tahun artinya rata-rata kuliah tingkat pertama. Kecamatan yang mencapai rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi selanjutnya adalah Sukmajaya yaitu di atas 12 tahun artinya lama sekolah penduduk yang berumur 25 tahun keatas sampai dengan kelas 12 atau kelas 3 SLTA. Sementara terendah angka rata-rata lama sekolah ada di Kecamatan Bojongsari. Rata-rata lama sekolah di kecamatan tersebut sekitar 10,51 tahun atau hampir sampai dengan kelas 2 SLTA.

Secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun keatas di kota Depok adalah sampai dengan kelas 2 SLTA. Hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok untuk dapat menetapkan prioritas pendidikan dengan lebih memudahkan masyarakat misalnya pendidikan gratis sampai dengan SLTA sebab jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Depok sangat tidak sebanding dengan banyaknya murid yang harus sekolah sementara sekolah di SLTA swasta memerlukan dana yang cukup bahkan mungkin mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Namun sekarang dengan adanya berbagai bantuan pendidikan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Depok.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019*
1.	Sawangan	10.46	10.52	10.59	10.66
2.	Bojongsari	10.14	10.27	10.39	10.51
3.	Pancoran Mas	10.99	11.04	11.10	11.16
4.	Cipayung	10.81	10.90	10.98	11.06
5.	Sukmajaya	11.43	11.63	11.82	12.02
6.	Cilodong	11.20	11.34	11.48	11.62
7.	Cimanggis	11.36	11.53	11.71	11.88
8.	Tapos	11.18	11.44	11.70	11.97
9.	Beji	10.49	10.60	10.71	10.81
10.	Limo	11.16	11.34	11.53	11.72
11.	Cinere	12.14	12.51	12.88	13.13
Kota Depok		10.76	10.84	10.85	11.05

*) Angka Sementara



*) Angka Sementara

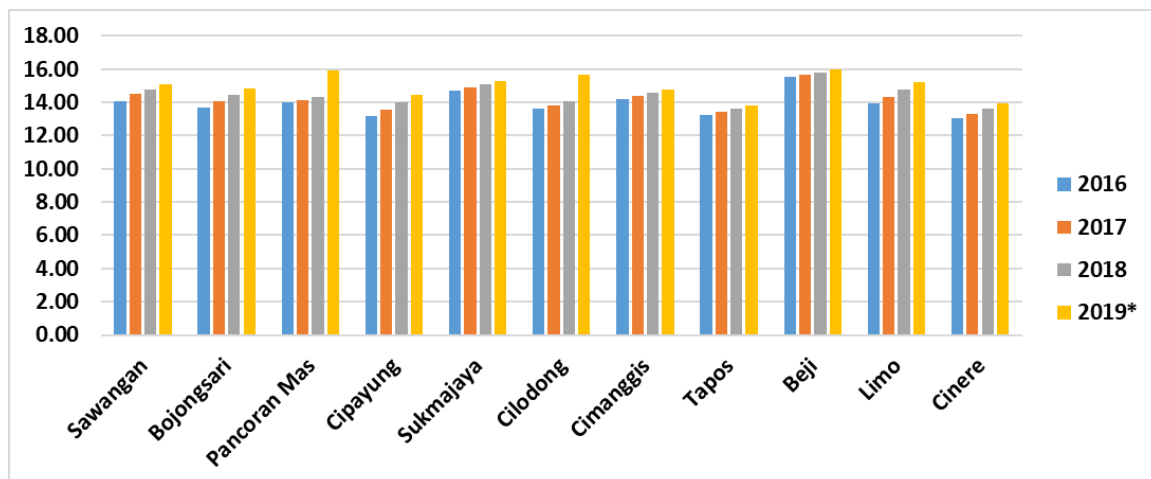
Gambar 4.2 Rata-rata Lama Sekolah Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

Harapan lama sekolah di Kota Depok tahun 2019 sebesar 14,34, artinya penduduk Depok diharapkan dapat bersekolah selama 14,34 tahun atau sampai dengan Diploma II. Angka harapan lama sekolah senantiasa naik meskipun sedikit dari tahun 2016 ke tahun 2019. Demikian halnya pada tiap kecamatan juga naik dari tahun 2016 ke tahun 2019. Harapan lama sekolah tertinggi ada di Kecamatan Beji sebesar 15,98 atau hampir Sarjana/Diploma IV, disusul Kecamatan Pancoran Mas yaitu 15,95 atau hampir Sarjana/Diploma IV dan Kecamatan Cilodong sebesar 15,66 atau hampir Sarjana/Diploma IV. Sementara itu harapan lama sekolah terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 14,43 atau Diploma II, disusul Kecamatan Cimanggis sebesar 14,80 atau hampir Diploma III.

Tabel 4.4 Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019*
1.	Sawangan	14.10	14.51	14.76	15.08
2.	Bojongsari	13.69	14.06	14.43	14.80
3.	Pancoran Mas	13.99	14.16	14.34	15.95
4.	Cipayung	13.17	13.58	14.01	14.43
5.	Sukmajaya	14.71	14.90	15.09	15.28
6.	Cilodong	13.64	13.84	14.05	15.66
7.	Cimanggis	14.19	14.39	14.59	14.80
8.	Tapos	13.22	13.42	13.62	13.82
9.	Beji	15.51	15.64	15.82	15.98
10.	Limo	13.94	14.36	14.78	15.20
11.	Cinere	13.02	13.32	13.63	13.93
Kota Depok		13.86	13.87	13.90	14.34

*) Angka Sementara



*) Angka Sementara

Gambar 4.3 Harapan Lama Sekolah Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Tahun)

4.5. Pengeluaran Perkapita

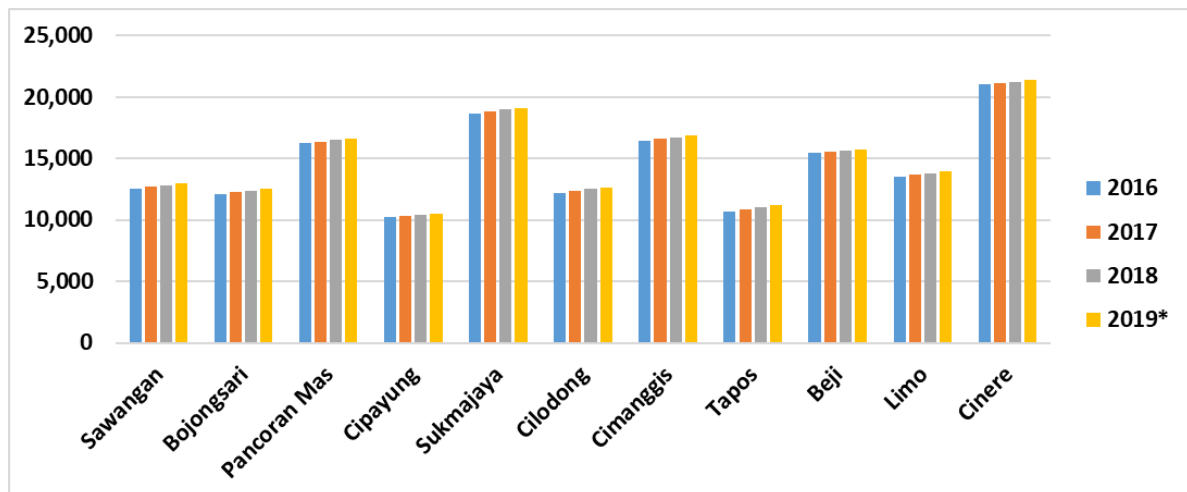
Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok pada tahun 2019 sebesar Rp. 15,29 juta perkapita per tahun. Kecamatan Cinere adalah kecamatan dengan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan penduduknya paling besar yaitu sebesar Rp. 21,38 juta dan yang terkecil sebesar Rp. 10,49 juta yang berada di Kecamatan Cipayung. Daya beli masyarakat Kecamatan Cinere yang tertinggi tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan

keseluruhan penduduk Cinere. Ketimpangan pendapatan antar penduduk belum bisa dilihat dengan angka ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat ketimpangan pendapatannya misalnya dengan menghitung *Gini Ratio*.

Tabel 4.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2019* (dalam Rp. Ribu)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019*
1.	Sawangan	12,534	12,678	12,823	12,968
2.	Bojongsari	12,085	12,232	12,381	12,530
3.	Pancoran Mas	16,264	16,394	16,524	16,654
4.	Cipayung	10,219	10,308	10,397	10,486
5.	Sukmajaya	18,675	18,829	18,983	19,138
6.	Cilodong	12,221	12,370	12,520	12,671
7.	Cimanggis	16,448	16,593	16,738	16,884
8.	Tapos	10,679	10,858	11,038	11,218
9.	Beji	15,433	15,545	15,657	15,770
10.	Limo	13,505	13,659	13,814	13,969
11.	Cinere	21,029	21,147	21,265	21,384
Kota Depok		14,560	14,727	15,262	15,291

*) Angka Sementara



*) Angka Sementara

Gambar 4.4 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019* (dalam Rp Ribu)

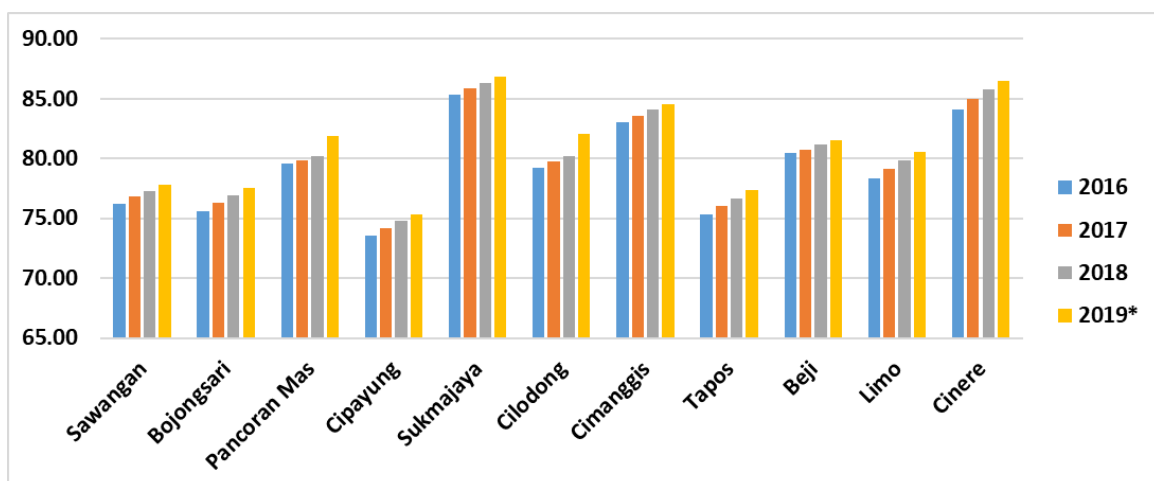
4.6. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok

Tabel-tabel di bawah ini memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan dan selisih atau kenaikannya dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kenaikan tertinggi pada tahun 2019 ada di Kecamatan Cilodong sebesar 1,83, disusul Kecamatan Pancoran Mas sebesar 1,69 dan Kecamatan Limo sebesar 0,73. Sedangkan kenaikan terendah ada di Kecamatan Beji sebesar 0,36 disusul Kecamatan Cimanggis, Sawangan dan Sukmajaya sebesar 0,51.

Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019*

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019*
1.	Sawangan	76.25	76.85	77.28	77.79
2.	Bojongsari	75.61	76.27	76.93	77.56
3.	Pancoran Mas	79.54	79.87	80.21	81.90
4.	Cipayung	73.56	74.17	74.77	75.36
5.	Sukmajaya	85.30	85.83	86.36	86.87
6.	Cilodong	79.20	79.72	80.23	82.05
7.	Cimanggis	83.03	83.55	84.07	84.58
8.	Tapos	75.31	76.00	76.69	77.35
9.	Beji	80.42	80.77	81.15	81.51
10.	Limo	78.34	79.10	79.85	80.58
11.	Cinere	84.13	84.97	85.81	86.46
Kota Depok		79.60	79.83	80.29	80.98

*) Angka Sementara



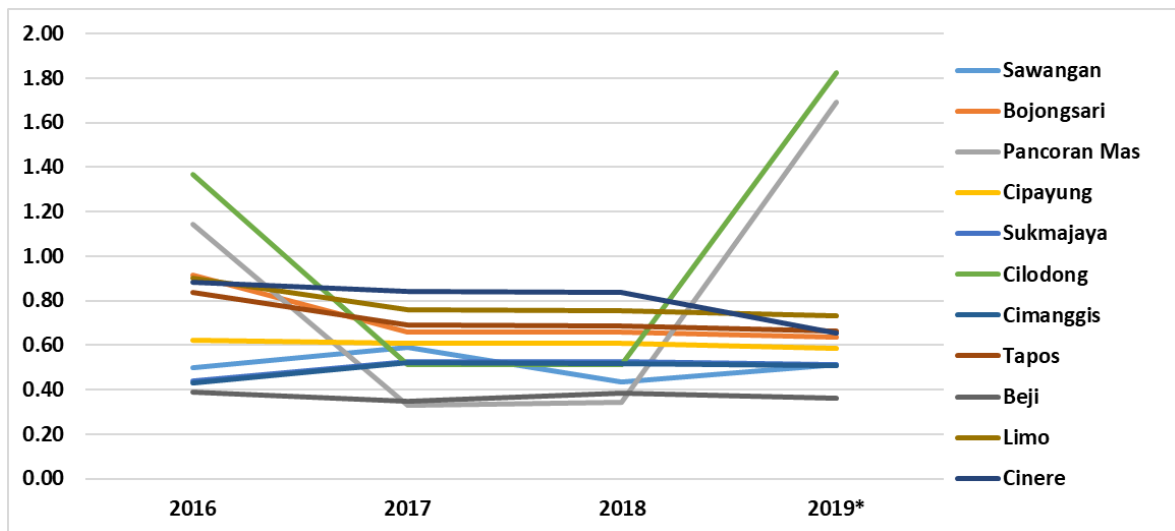
*) Angka Sementara

Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016- 2019*

Tabel 4.7 Selisih Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2019*

No.	Kecamatan	2015 ke 2016	2016 ke 2017	2017 ke 2018	2018 ke 2019*
1.	Sawangan	0.50	0.59	0.43	0.51
2.	Bojongsari	0.92	0.66	0.66	0.63
3.	Pancoran Mas	1.14	0.33	0.34	1.69
4.	Cipayung	0.62	0.61	0.61	0.58
5.	Sukmajaya	0.44	0.53	0.53	0.51
6.	Cilodong	1.37	0.51	0.51	1.83
7.	Cimanggis	0.43	0.52	0.52	0.51
8.	Tapos	0.84	0.69	0.69	0.66
9.	Beji	0.39	0.35	0.38	0.36
10.	Limo	0.90	0.76	0.76	0.73
11.	Cinere	0.88	0.84	0.84	0.65
Kota Depok		0.49	0.23	0.46	0.69

*) Angka Sementara



*) Angka Sementara

Gambar 4.6 Selisih IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2019*

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Namun untuk menyikapi data IPM dan komponennya tidak bisa secara parsial sehingga menghasilkan kebijakan yang salah.

Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan komponen dari IPM tidak serta merta mengindikasikan bahwa daerah dengan AHH lebih tinggi, tingkat polusi daerah tersebut lebih rendah daripada daerah dengan AHH lebih rendah. Mobilitas penduduk yang sangat besar memberi arti bahwa penduduk tersebut tidak sepanjang hari bermukim di tempat tinggal mereka.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun penduduk usia 7 tahun keatas menjalani pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Depok.

Purchasing Power Parity (daya beli) tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata. Namun untuk melihat ketimpangan kesejahteraan belum bisa dilihat dari nilai ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihatnya, seperti melihat angka *Gini Ratio*.

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesehatan jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga

melihat indikator indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

5.2. Saran

Dengan adanya gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok, setiap kecamatan di Kota Depok diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah Kota Depok perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW siaga. Di bidang pendidikan, menaikkan rata-rata lama sekolah dengan mengkatifkan kejar paket A, paket B maupun paket C serta memastikan penduduk usia sekolah dapat bersekolah semuanya. Setelah mengikuti kejar paket A dan paket B, apabila masih terkejar umurnya, perlu dimasukkan kembali ke pendidikan formal.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia maka perlu mengoptimalkan peran komponen masyarakat, misalnya pemuka agama. Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya sinergis dengan upaya kesetaraan jender dan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, 2018. Kota Depok Dalam Angka Tahun 2018, Depok: BPS Kota Depok.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2014, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS)
- _____, 2018. Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017, Jakarta: BPS.
- _____, 2019. Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018, Jakarta: BPS.
- Boediono, 1982. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM
- Kuncoro, M., 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP), 2018. *Human Development Indices and Indicators*, New York: UNDP



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Depok**

**Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok
Telp. (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id**